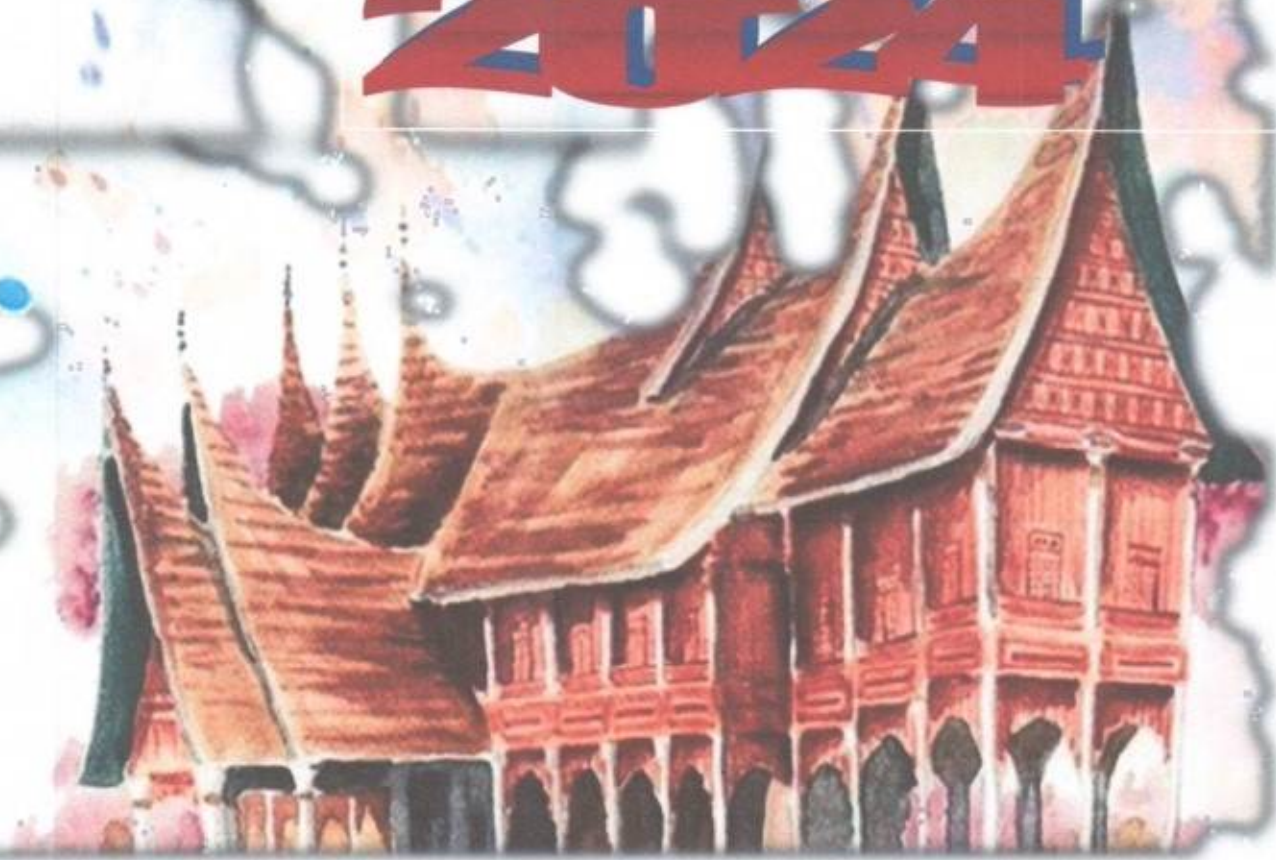




Laporan Kinerja

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

2024





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024.

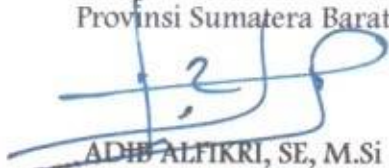
Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan selalu mengupayakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhir kata, Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2025
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197304131997031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dengan melaksanakan Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital dan Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani.

Berdasarkan tujuan diatas maka Indikator Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah:

1. Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Sedangkan sasaran strategis pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Pendukung yang dicapai dengan 6 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah 107,92% , yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Pencapaian IKU Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja
Tahun 2024

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (ribu US\$) PMDN (juta Rp.) Total (juta Rp.)	120.659,00 11.126.000.000.000,00 12.863.482.400.000,00	121.538,43 13.937.488.244.480,00 13.760.564.694.480,00	100,73% 125,27% 122,52%
			Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1		122,52%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625/ 3,91	101,19% / 102,62%
			Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 2		101,19%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	80,50 / A	80,53 / A	100,04%
			Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 3		100,04%
			Rata – Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3		107,92%

Sumber : Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2024

Indikator *outcome* yang ditargetkan pada Tahun 2024 adalah indikator Kinerja Utama (IKU), berupa indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Capaian IKU Tahun 2024 selanjutnya digunakan untuk menilai capaian Sasaran Strategis Tahun 2024. Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2024 yang didukung capaian IKU (*outcome*) adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” tahun 2024 sebesar 122,52% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
2. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu” tahun 2024 sebesar 101,19% diukur melalui capaian 1 (satu) IKU.
3. Capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” Tahun 2024 sebesar 100,04% diukur melalui capaian 1 (satu) IKP.

Seluruh rencana capaian kinerja Tahun 2024 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100%, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ihktisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Grafik	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	2
1.2.1. Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.3. Struktur Organisasi	4
1.2.4. Sumber Daya Manusia	6
1.3. Aspek Strategis Organisasi	10
1.4. Permasalahan Utama (<i>Strategic issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi	11
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Tujuan dan Sasaran	15
2.2. Strategi dan Kebijakan	17
2.3. Perjanjian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	20
2.4. Struktur Program dan Kegiatan	22
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	27
3.3. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.3.1. Tujuan 1 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	32
3.3.2. Tujuan 2 Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	73
3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2024	92
3.5. Penghargaan Tahun 2024	97
BAB. IV PENUTUP	98

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Penghargaan Yang Diterima Tahun 2024
3. Rekapitulasi Realisasi Investasi PMA dan PMDN

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	6
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	8
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	9
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tujuan 1 Tahun 2023 - 2024	35
Grafik 3.3	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja RPJMD dan Renstra OPD 2021 -2026 Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Tahun 2021 - 2024	37
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024	40
Grafik 3.5	Perbandingan Target, Realisasi Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024	41
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Realisasi Investasi PMA Tahun 2023 - 2024	43
Grafik 3.7	Perbandingan Target, Realisasi Investasi PMA Tahun 2021 - 2024	44
Grafik 3.8	Perbandingan Realisasi dan Capaian Realisasi Investasi PMDN Tahun 2023 - 2024	46
Grafik 3.9	Perbandingan Target, Realisasi Investasi PMDN Tahun 2021 - 2024	47
Grafik 3.10	Perbandingan Target, Realisasi Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 - 2024	61
Grafik 3.11	Perbandingan Target, Realisasi Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2024	62
Grafik 3.12	Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi per Komponen Tahun 2024	76
Grafik 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023 - 2024	77
Grafik 3.14	Capaian Tujuan 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2021 - 2024	78

Grafik 3.15	Perkembangan Realisasi Anggaran dengan Target Penyerapan Anggaran Tahun 2024	92
Grafik 3.16	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 - 2024	76

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Pencapaian IKU Sasaran Strategis pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024	v
Tabel 1.1. Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	7
Tabel 1.2. Daftar Golongan Pegawai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	8
Tabel 1.3. Daftar Pejabat Fungsional DPMPTSP Tahun 2024	9
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP 2021-2026	16
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP Tahun 2021 - 2026	18
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024	18
Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	22
Tabel 3.1. Skor Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	29
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Tahun 2024	34
Tabel 3.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi Tahun 2021 - 2024	36
Tabel 3.5. Target dan Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Tahun 2024	37
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2024	39
Tabel 3.7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja RPJMD/RENSTRA OPD Tahun 2021 -	48
Tabel 3.8. Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat Nasional Tahun 2021-2024	49
Tabel 3.9. Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat Nasional Tahun 2021-2024	49
Tabel 3.10. Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat Regional Tahun 2021-2024	50
Tabel 3.11. Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat Regional Tahun 2021-2024	50
Tabel 3.12. Caaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat Tahun 2024	56

Tabel 3.13.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	60
Tabel 3.14.	Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja RPJMD/OPD Tahun 2021-2026 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63
Tabel 3.15.	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	70
Tabel 3.16.	Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra OPD Tahun 2021 - 2026	74
Tabel 3.17.	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani Tahun 2024	75
Tabel 3.18.	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 - 2026	79
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Rentra Tahun 2021 - 2026	79
Tabel 3.20	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024	87
Tabel 3.21.	Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024	96
Tabel 3.23	Nilai Indeks Unsur Pelayanan Yang Diobservasi Tahun 2023	72
Tabel 3.24	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 - 2023	73
Tabel 3.25	Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2023	74
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023	79
Tabel 3.27	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani Tahun 2023	81
Tabel 3.28	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023	82
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023	83
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2023	85
Tabel 3.31	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah sesuai RPJMD	89
Tabel 3.32	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja RPJMD dengan Sasara Strategis OPD	92
Tabel 3.33	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja RPJMD dengan Sasara Strategis OPD	93

Tabel 3.34	Tingkat Edisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	94
Tabel 3.35	Daftar Inovasi Daerah pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	97
Tabel 3.36	Daftar Penghargaan yang diterima DPMPTSP Tahun 2023	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat	5
Gambar 2.1. Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, sasaran DPMPTSP pada RPJMD	19
Gambar 3.1. Tujuan 1, Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2 serta Indikator Kinerja	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang Urusan Penanaman Modal dan menjalankan tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di urusan Penanaman Modal.

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan laporan tahun Ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.2. GAMBARAN ORGANISASI

1.2.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai Pasal 2 serta Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di Lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- d. Pelaksanaan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. Pelaksanaan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.2.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal. Secara kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di urusan Penanaman Modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat Eselon II Provinsi. Unsur

pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. Kepala Dinas dijabat oleh Adib Alfikri, SE, M.Si
2. Sekretaris dijabat oleh Yudhi Ichsan Arianto, ST.yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dijabat oleh Hendri Gusman
3. UPTD;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1.
Struktur dan Organisasi
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat



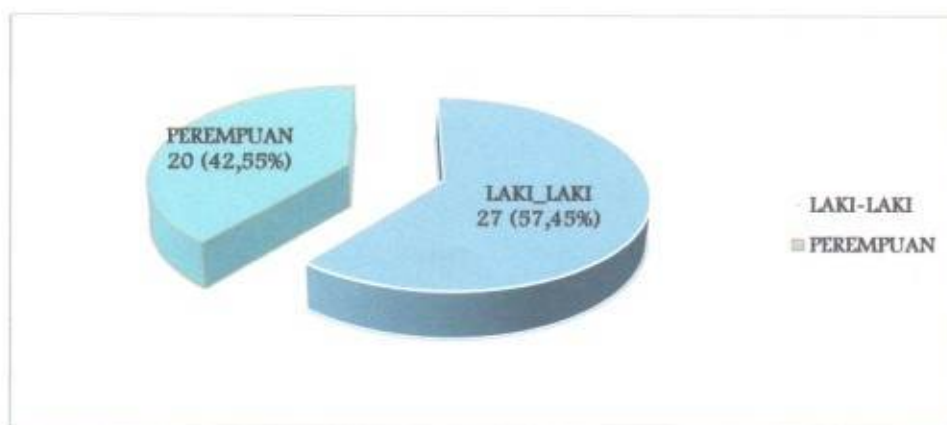
Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 Tahun 2023

1.2.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang berjumlah 47 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 27 orang (57,45%) laki-laki dan 20 orang (42,55%) perempuan.

Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

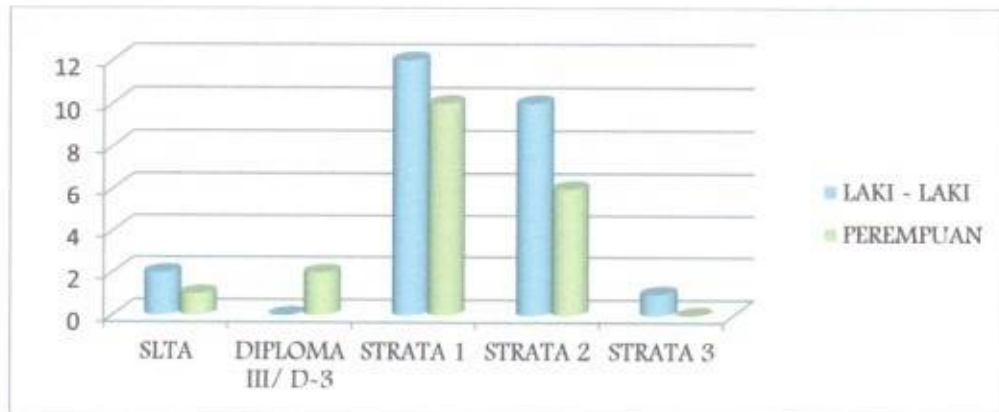
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

N O	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	SLTP	-	-	-	0%
2.	SLTA	2	1	3	6,38%
3.	DIPLOMA III/ D-3	-	2	2	4,26%
4.	STRATA 1	13	11	24	51,06%
5.	STRATA 2	11	6	17	36,17%
6.	STRATA 3	1	-	1	2,13%
JUMLAH		27	20	47	100,00%

Sumber : Subbag Umum DPM& PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 93,62% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 38,30% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

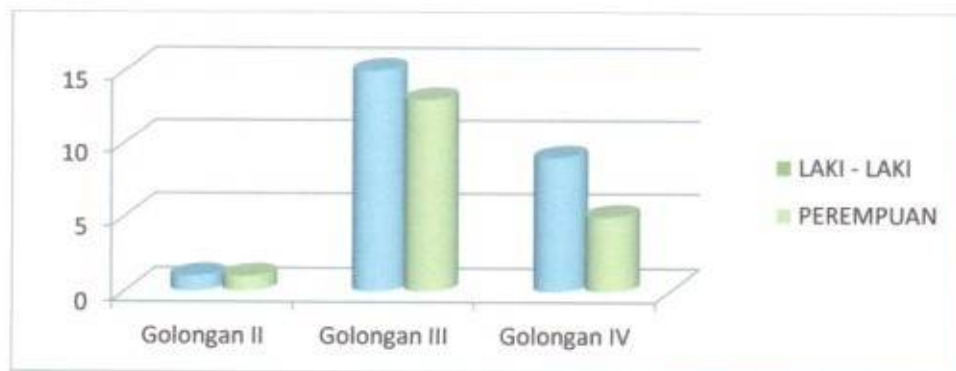
NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Golongan I	-	-	0	0%
2.	Golongan II	1	1	2	4,25%
3.	Golongan III	16	14	30	63,83%
4.	Golongan IV	10	5	15	31,92%
	JUMLAH	27	20	47	100,00%

Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 95,45% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 10

tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, per golongan:

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024



Sumber : Subag Umum DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

Komposisi Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Daftar Pejabat Fungsional DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	JABATAN FUNSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Perencana Ahli Muda	1	-	1
2.	Penerjemah Ahli Muda	-	1	1
3.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	-	1
4.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	2	3
5.	Penata Perizinan Ahli Madya	2	1	3
6.	Penata Perizinan Ahli Muda	4	-	4
7.	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	2	3
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	2
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	1	4
	JUMLAH	14	8	22

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat 2024

1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pembangunan bidang penanaman modal, dalam rangka menjamin terciptanya investasi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai dinas yang mengkaji berbagai kebijakan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan.

Investasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia umumnya dan terkhusus untuk Sumatera Barat. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan ketiga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,33 persen dibanding tahun 2023 dan berada pada peringkat ketujuh di Sumatera. Sumatera Barat menyumbang 6,72 persen terhadap perekonomian di Pulau Sumatera dan sebesar 1,50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (sumber : Padang *IDN Times* tgl. 06 Nov 24 | 07:19)

Sejalan dengan sasaran kepala daerah yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi** yang menjadi Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan indikator kinerja **Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi** sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah sebagai ujung tombak penggerak roda perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. yang mampu untuk meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan daya saing untuk menarik investasi dari dalam maupun luar

negeri. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan meningkatnya pertumbuhan investasi menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2021- 2026.

Pencapaian sasaran ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi kebijakan pemerintah pusat atau pun daerah, sumber daya ekonomi, potensi sumber daya alam yang banyak, ketersediaan tenaga kerja serta dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di daerah. Indikator yang telah ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan data Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang berdasarkan release yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI dan diolah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, di mana Akumulasi Nilai Realisasi Investasi ini berasal dari Akumulasi realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah dikonversikan ke nilai rupiah.

Berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, persentase peningkatan investasi di Provinsi ditargetkan sebesar 9,5% selama tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi 1,5%.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dinas pelaksana urusan penanaman modal perlu melakukan akselerasi dan menyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain :

1. Belum tuntasnya Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat terkait dengan prose penetapan regulasi terkait dengan kemudahan berusaha;
2. Perubahan sistem pelaporan dari OSS versi 1.1 ke OSS – RBA mengharuskan perusahaan untuk melakukan migrasi data terlebih dahulu;
3. Banyaknya perusahaan yang belum melaporkan LKPM karena ketidak tahuan perusahaan tersebut terhadap kewajiban dalam penyampaian LKPM dan karena keterbatasan SDM perusahaan yang memahami tatacara pelaporan LKPM;
4. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya serta aksesibilitas yang sulit dijangkau.
5. Banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS-RBA dan LKPM.
6. Keterlambatan pemenuhan izin oleh pelaku usaha akibat sistem yang baru melalui OPD Teknis seperti RTRW, RDTR, Izin lingkungan,PKKPR, SIMBG, dan syarat teknis lainnya.
7. Belum Clear and Cleannya tanah lokasi untuk berinvestasi., disebabkan tanah di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
8. Adanya permasalahan Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga banyak pelaku usaha/Perusahaan PMA/PMDN tidak jadi melanjutkan rencana investasinya dikarenakan tidak ada kesesuaian tata ruang untuk investasi.
9. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;
10. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
11. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
12. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
13. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;

14. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka;
15. Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KERJA



Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan. Dari dokumen RPJMD tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana strategis yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, target, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan, yang kemudian digunakan menjadi dasar penyusunan ikhtisar perjanjian kinerja.

Sehubungan dengan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana terdapat perbedaan target kinerja antara Laporan Kinerja dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Terjadinya perbedaan ini dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja pada perjanjian kinerja dengan melihat dan memperhatikan realisasi kinerja yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar Rp. 11.747.473.000.000,- dengan rincian PMA sebesar 120.658,50 ribu US\$ dan PMDN sebesar Rp. 9.961.727.200.000,-. Penyesuaian Perjanjian Kinerja dilakukan, dikarenakan capaian realisasi tahun sebelumnya sudah lebih tinggi dari target yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra OPD) secara total sebesar Rp. 6.134.882.000.000 dengan rincian PMA sebesar 169.230 ribu

US \$ dan PMDN sebesar Rp. 3.697.970.000.000. Sehingga untuk target kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun berikutnya (tahun 2024) menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan kondisi ini sudah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Melalui sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi, dengan indikator tujuan yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi; dan
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani, dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja.OPD

Melalui tujuan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun sasaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN;

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Berdasarkan Uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021-2026 dalam tabel sebagai 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5	4	6	7	8	9	10	11	
		-	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	%	6%	6%	8%	9,50%	10,50%	11,50%
		Meningkatnya Realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan FMDN Total PMA (ribu US \$) FMDN (juta Rp.)	Rp. juta ribu US \$ juta Rp.		5.187.640 143.100 3.127.000	5.602.670 154.550 3.377.150	6.134.882 169.230 3.697.970	6.779.050 187.000 4.086.250	7.558.550 208.500 4.556.150
		Meningkatnya Kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai / Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47
2.	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	-	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80,00 / BB	80,00 / BB	80,25 / A	80,50 / A	80,69 / A	80,82 / A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai / Kategori	80,00 / BB	80,00 / BB	80,25 / A	80,50 / A	80,69 / A	80,82 / A

Sumber : Rencana Strategis DPMPTSP 2021 - 2026

2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut, diuraikan dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

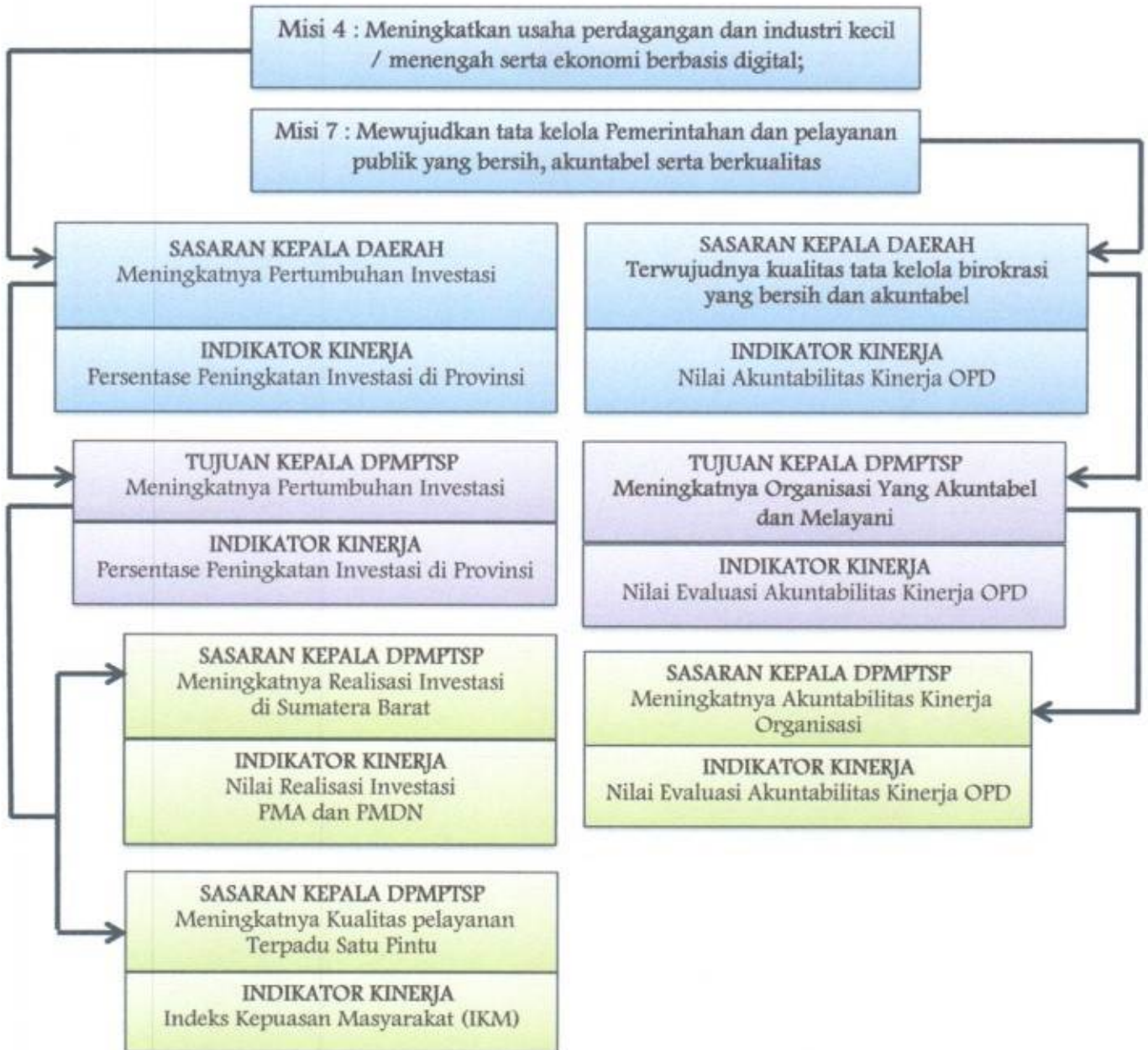
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	1. Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi 2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan Layanan Investasi dan Penanaman Modal	1. Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Investasi serta Pengembangan Layanan Investasi Berbasis Teknologi Informasi 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3. Pengembangan Layanan Investasi Yang memberikan Kemudahan, Kepastian, dan Transparansi Proses Perizinan bagi Investor dan Pengusaha 4. Pembentukan Produk Hukum Daerah / Regulasi Daerah untuk Kemudahan Perizinan dan Kemudahan Berinvestasi
Meningkatnya Organisasi Akuntabel dan Melayani	3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM Organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi
		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi

Sumber : Rencana Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, secara ringkas dapat dilihat melalui gambar 2.1. berikut :

Gambar 2.1
Keterkaitan Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD



Sumber : Rencana Strategis DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dengan penerima amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai evaluasi kinerja aparatur.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 02 Desember 2024. Terjadinya perubahan perjanjian kinerja ini dikarenakan adanya penyesuaian atas target realisasi investasi PMA ke target realisasi investasi PMDN, dikarenakan (1) Minimnya investor lokal yang menjadi pendamping investor asing, sehingga berpengaruh kepada minat investor PMA ke Sumatera Barat; (2) Belum adanya investor PMA yang melakukan investasi di tahun 2024; (3) Realisasi investasi PMA dan PMDN sampai dengan kondisi triwulan 3 yang masih di bawah target; (4) Potensi investasi di Sumatera Barat masih banyak di usaha Mikro dan Kecil; dan perubahan perjanjian kinerja ini tidak merubah target tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi sebesar 9,5% di

RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Target kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 menyesuaikan dengan realisasi kinerja tahun 2023, sehingga tidak akan mempengaruhi capaian target tujuan OPD yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dan kemudian kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit kerja dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) PMDN (Rp.) Total (Rp.)	80.000,00 11.711.482.400.000,00 12.863.482.400.000,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48/ 3,81
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,50 / A

*) 1 US \$ = Rp. 14.400,-

**) Angko total target investasi PMA dan PMDN sudah merupakan akumulasi dari angka PMDN dan PMA yang sudah dikonversikan ke nilai Rupiah.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ANGGARAN APBD	15.500.647.054,-	APBD / DAK NON FISIK
1.1	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.080.421.640,-	APBD
1.2.	<i>Program</i> Pengembangan Iklim Penanaman Modal	588.991.507,-	APBD / DAK NON FISIK
1.3.	<i>Program</i> Promosi Penanaman Modal	229.436.531,-	APBD
1.4.	<i>Program</i> Pelayanan Penanaman Modal	1.129.881.914,-	APBD
1.5.	<i>Program</i> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.434.967.900,-	APBD / DAK NON FISIK
1.6.	<i>Program</i> Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.947.562,-	APBD / DAK NON FISIK

2.	ANGGARAN DEKONSENTRASI	337.173.000,-	
2.1	<i>Program</i> Penanaman Modal	252.689.000,-	Dekon Kementerian Investasi/BKPM RI
2.2	<i>Program</i> Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	84.484.000,-	Dekon Kementerian Dalam Negeri
TOTAL ANGGARAN		15.837.820.054,-	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

2.4. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.

Untuk mencapai tujuan, sasaran yang sudah ditargetkan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tahun 2024, sebagaimana tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
terkait Langsung Pencapaian Sasaran
Tahun 2024

NO	PPROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.500.647.054,-
	URUSAN PENANAMAN MODAL	15.500.647.054,-
I.	<i>Program</i> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.080.421.640,-
I.1.	<i>Kegiatan</i> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.119.408,-
I.1.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	109.387.750,-
I.1.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.731.658,-
I.2.	<i>Kegiatan</i> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.012.782.324,-
I.2.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.773.775.441,-
I.2.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	216.157.200,-
I.2.3.	<i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	22.849.683,-
I.3.	<i>Kegiatan</i> Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.400.000,-
I.3.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	14.400.000,-
I.4.	<i>Kegiatan</i> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.281.786,-
I.4.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	67.500.000,-

	Kelengkapannya	
I.4.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.781.786,-
I.5.	<i>Kegiatan</i> Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.303.371.718,-
I.5.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.981.400,-
I.5.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.347.110,-
I.5.3.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.252.000,-
I.5.4.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.170.000,-
I.5.5.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	17.080.000,-
I.5.6.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	958.533.240,-
I.5.7.	<i>Sub Kegiatan</i> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	171.007.968,-
I.6.	<i>Kegiatan</i> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.899.180,-
I.6.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.745.800,-
I.6.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Pengadaan Mebel	31.153.380,-
I.7.	<i>Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.407.000,-
I.7.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.370.900,-
I.7.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	868.036.100,-
I.8.	<i>Kegiatan</i> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.160.224,-
I.8.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.740.000,-
I.8.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Mebel	11.000.000,-
I.8.3.	<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.810.224,-
I.8.4.	<i>Sub Kegiatan</i> Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.610.000,-
II.	<i>Program</i> Pengembangan Iklim Penanaman Modal	588.991.507,-
II.1.	<i>Kegiatan</i> Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	19.227.225,-
II.1.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal	19.227.225,-
II.2.	<i>Kegiatan</i> Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	569.764.282,-
II.2.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	79.149.398,-
II.2.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada PIR (Potensi Investasi Regional)	3.849.200,-
II.2.3.	<i>Sub Kegiatan</i> Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	134.398.000,-
II.2.4.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	352.367.684,-
III.	<i>Program</i> Promosi Penanaman Modal	229.436.531,-
III.1.	<i>Kegiatan</i> Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	229.436.531,-
III.1.1.	<i>Sub Kegiatan</i> Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	182.947.404,-
III.1.2.	<i>Sub Kegiatan</i> Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	46.489.127,-
IV.	<i>Program</i> Pelayanan Penanaman Modal	1.129.881.914,-

IV.1.	Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.129.881.914,-
IV.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	192.066.626,-
IV.1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	692.058.488,-
IV.1.3.	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	245.756.800,-
V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.434.967.900,-
V.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.434.967.900,-
V.1.1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	527.942.400,-
V.1.2.	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	215.563.200,-
V.1.3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	691.462.300,-
VI.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.947.562,-
VI.1.	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	36.947.562,-
VI.1.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36.947.562,-
TOTAL PAGU ANGGARAN		15.500.647.054,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dibangun dengan komitmen mengimplementasikan ISO 9001:2015 lingkup pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya penyempurnaan dari ISO 9001:2015 dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kehutanan yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini

mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumusan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkankinerja yang baik, % capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;
2. Menganalisis penyebab/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan, dan;
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun mendatang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan kinerja tahun ke-4 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas, pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian dan provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 3.1 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) * PMDN (Rp.) Total (Rp.) **	80.000,00 11.711.482.400.000,00 12.863.482.400.000,00	121.538,43 13.937.488.244.480,00 15.760.564.694.480,00	151,92% 119,01% 122,52%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48/ 3,81	97,625/ 3,91	101,18%/ 102,62%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80,50 / A	80,53 / A	100,04%/ 100 %
Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja					107,91%
*) Target 1 US \$ = Rp. 14.400,- dan Realisasi 1 US \$ = Rp.15.000,- **) Realisasi Investasi PMDN dan PMA adalah Akumulasi dari realisasi investasi PMDN dan PMA yang sudah dikonversi kedalam nilai rupiah					

Sumber : Hasil Olahan DPM & PTSP Tahun 2024

Dari capaian kinerja atas 3 (tiga) indikator kinerja diatas dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Pengukuran kinerja dari indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN merupakan cerminan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal. Insha Allah mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di provinsi Sumatera Barat.

2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hasil evaluasi atas tingkatkepuasan terhadap pelayanan UPP yang didapat melalui hasil pada survei dan e-survei kepuasan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Survei dan e-survei ini diisi oleh setiap tamu yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya pada urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

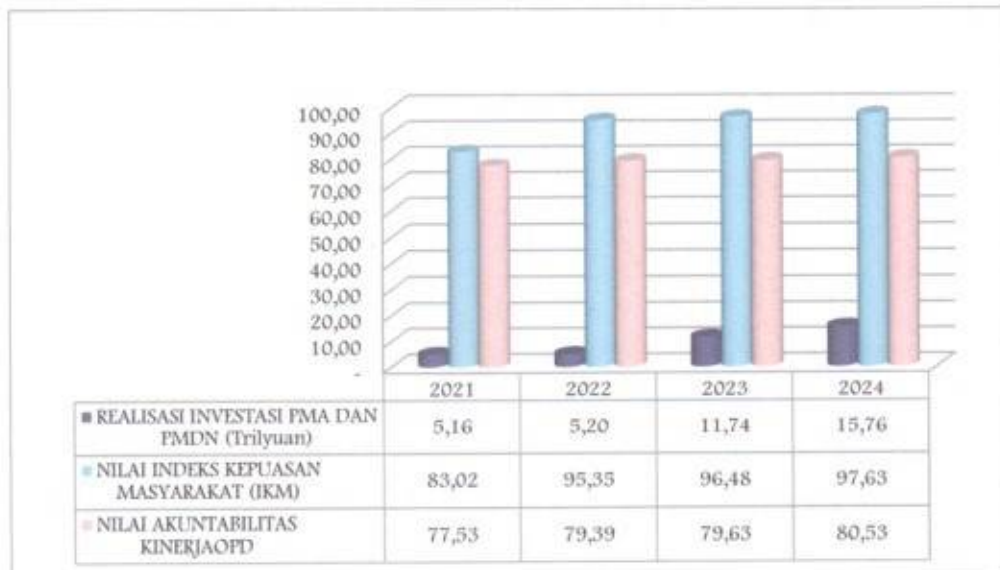
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Hasil evaluasi nilai akuntabilitas kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pencapaian atas pengukuran kinerja Organisasi masih perlu lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan penilaian dari 4 (empat) komponen yang dinilai, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal nilainya masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pembobotannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) realisasi kinerja sasaran strategis dengan masing – masing indikator kinerjanya, secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 107,91% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pertumbuhan investasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 telah dilakukan dengan sangat baik.

Perbandingan hasil pengukuran realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2024 sesuai dengan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, seperti tampak dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Hasil Pengukuran
Realisasi Kinerja Sasaran
Tahun 2021 s.d 2024



Sumber Data : Diolah dari data kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana disajikan diatas, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (*outcome*) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut.

3.3.1. TUJUAN 1 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN INVESTASI

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 4 yaitu Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital yang memiliki tujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing, Kepala Daerah merumuskan 6 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Investasi yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Berdasarkan hal inilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dengan 1 tujuan dan 2 sasaran. Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1
Tujuan I , Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II
Serta Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penetapan target kinerja indikator tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi sesuai dengan dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomr 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026

Pada tujuan pertama, yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi** dengan target pada tahun 2024 sebesar 9,50% terealisasi sebesar 34,16%. Sumber data indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi didapat melalui release Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI dan membandingkannya dengan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi **Meningkatnya Pertumbuhan Investasi** dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja
Tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Investasi dengan
Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	9,5%	34,16 %	359,58%

Sumber : Hasil Olahan DPM & PTSP Tahun 2024

Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan pertama yakni Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi diperoleh dari Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, kemudian dibagi dengan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n – 1, seperti di bawah ini:

Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi

$$= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n} - \text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}}{\text{Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun n-1}} \times 100\%$$

$$= \frac{15.760.564.694.480,- - 11.747.473.000.000,-}{11.747.473.000.000,-} \times 100\%$$

$$= \frac{4.013.091.694.480,-}{11.747.473.000.000,-} \times 100\%$$

$$= 34,16\%$$

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Dari tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja tujuan Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2024 dari yang ditargetkan dalam RPJMD dan Renstra OPD sebesar 9,5% dapat direalisasikan sebesar 34,16% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 359,58% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

Perbandingan realisasi tujuan dengan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja tujuan pertama dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2024, yang terealisasi sebesar 34,16% mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 13,55% dibandingkan dengan realisasi kinerja 2023, dimana realisasi kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi tahun 2023 sebesar 20,61%. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.2 berikut :

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dari Tujuan 1 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2021 – 2024

NO	TAHUN	TAHUN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	2021	6,00 %	5,02 %	83,67 %
2.	2022	6,00 %	0,79 %	13,17 %
3.	2023	8,00 %	20,61%	257,63 %
4.	2024	9,50 %	34,16%	359,58 %

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

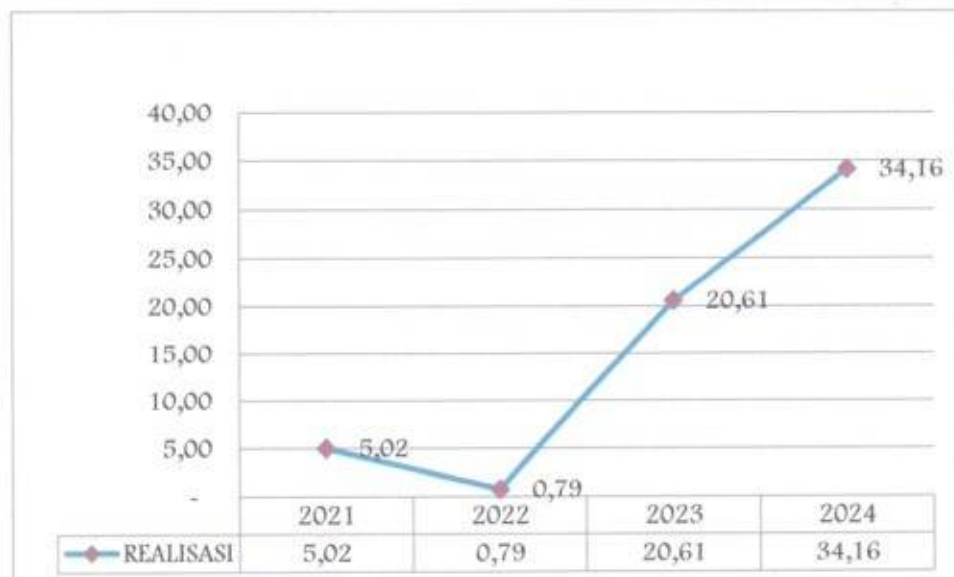
Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Sasaran Kepala Daerah Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi langsung menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.4 dan terlihat dalam grafik 3.2 berikut ini :

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Tahun 2024
dengan Target Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD / RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi	9,50%	34,16%	359,58%	11,50%	290,04%
Rata – Rata Capaian Kinerja				359,58%		

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Grafik 3.3
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD dan Renstra OPD 2021 - 2026
Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi
Tahun 2021 – 2024



Sumber : DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berupaya maksimal mencapai target kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Hal ini terlihat dari progres realisasi setiap tahunnya, dimana realisasi Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi pada tahun 2021 sebesar 5,02% menjadi 34,16% pada tahun 2024. Capaian ini tidak terlepas dari setiap upaya perbaikan yang dilakukan terhadap kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi.

Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, yakni “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera” dengan indikator kinerja “Nilai Realisasi Ivestasi PMA dan PMDN” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dari kedua sasaran strategis tersebut, adalah sebagaiberikut:

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
---------------------	--

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” dilihat berdasarkan realisasi investasi PMA dan PMDN dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1.1
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN			
	PMA (ribu US \$)	80.000,00	121.538,43	151,92 %
	PMDN (juta Rp)	11.711.482.400.000,00	13.937.488.244.480,00	119,01 %
	Total (Rp.)*	12.863.482.400.000,00	15.760.564.694.480,00	122,52 %
Rata – Rata Kinerja Sasaran Startegis 1				122,52 %
*) 1 US \$ = Rp. 15.000,- **) Angka total target dan realisasi investasi PMA dan PMDN sudah merupakan akumulasi dari angka PMDN dan PMA yang sudah dikonversikan ke nilai Rupiah				

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi tahun n}} \times 100\% \\
 &= \frac{15.760.564.694.480,-}{12.863.482.400.000,-} \times 100\% \\
 &= 122,52\%
 \end{aligned}$$

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

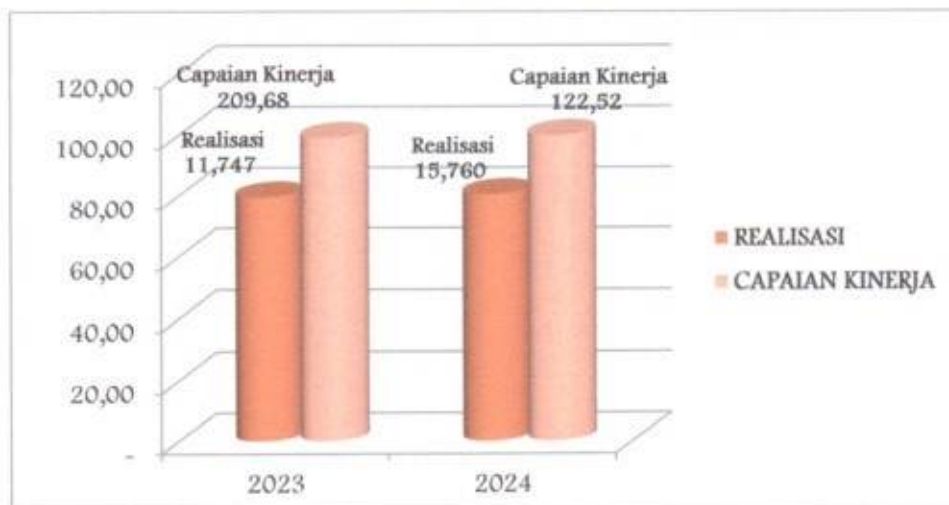
Dari tabel 3.5 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja sangat tinggi sebesar 122,52%, dimana Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN secara total ditargetkan sebesar Rp. 12.863.482.400.000,- (dua belas trilyun delapan ratus enam puluh tiga milyar empat ratus delapan

puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan dapat terealisasi sebesar Rp. 15.760.564.694.480,- (lima belas trilyun tujuh ratus enam puluh milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2024 sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.013.091.694.480,- dibandingkan tahun 2023 dimana nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 11.747.473.000.000,- dan capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 122,52%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini menurun sebesar 87,16%,- dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 209,68%. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.4 berikut :

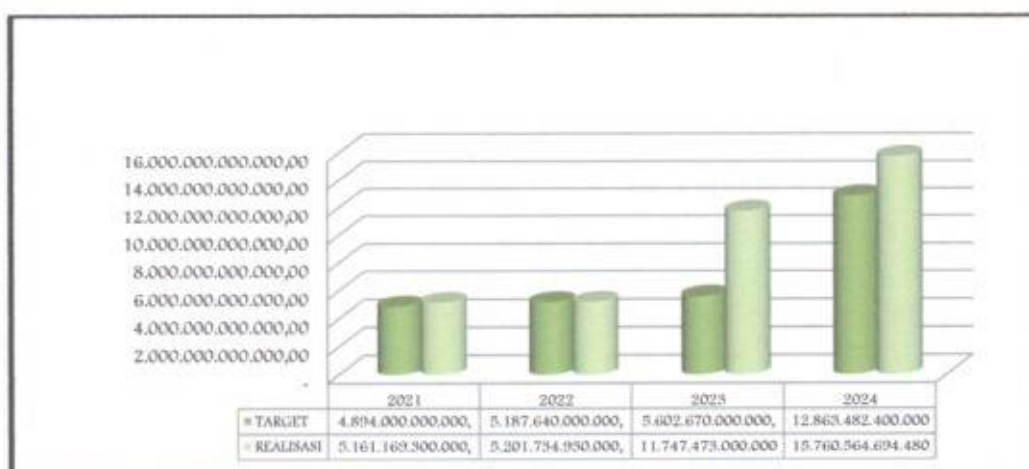
Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Grafik 3.5
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2024



Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai realisasi investasi ini terdiri dari PMA dan nilai realisasi investasi PMDN, dimana masing – masing pencapaian kinerjanya selama tahun 2024, sebagai berikut:

Realisasi Investasi PMA dari yang ditargetkan sebesar US\$ 80.000 ribu dapat direalisasikan sebesar US\$ 121.538,43 ribu atau sebesar 151,92% dengan tingkat capaian kinerja Sangat Tinggi. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n, seperti di bawah ini:

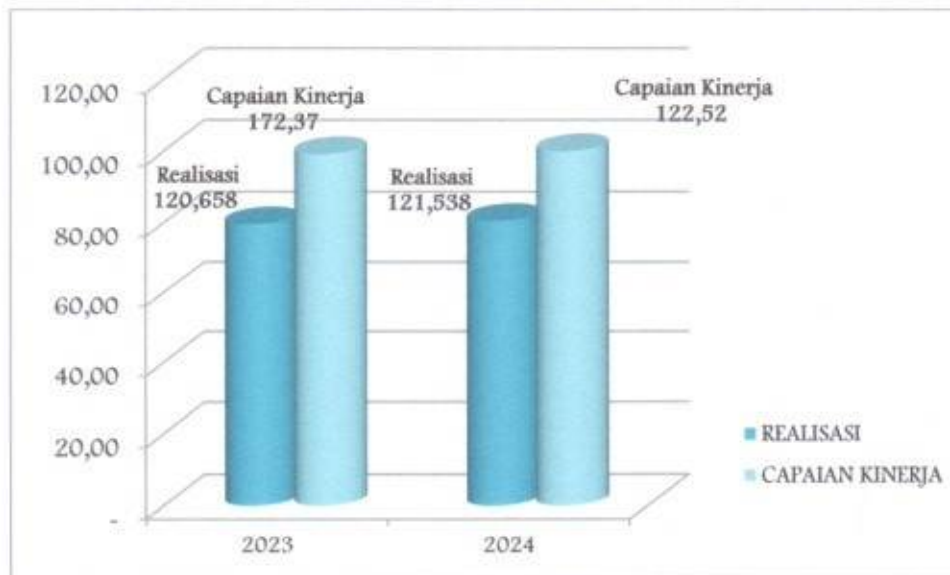
Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMA		
=	$\frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMA tahun n}}$	X 100%
=	$\frac{121.538,43}{80.000,00}$	X 100%
=	151,92%	

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, yang terdiri dari Nilai Realisasi PMA berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Secara nilai, Nilai Realisasi Investasi PMA tahun 2024 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, sebesar US\$. 121.538,43 ribu mengalami kenaikan sebesar US\$. 879,93 ribu dibandingkan tahun 2023, dimana nilai realisasi investasi PMA sebesar US\$. 120.658,50 ribu dan capaian kinerjanya sebesar 151,92%

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, realisasi investasi PMA tahun 2024 menurun sebesar 20,45% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebelumnya sebesar 172,37. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.6 berikut :

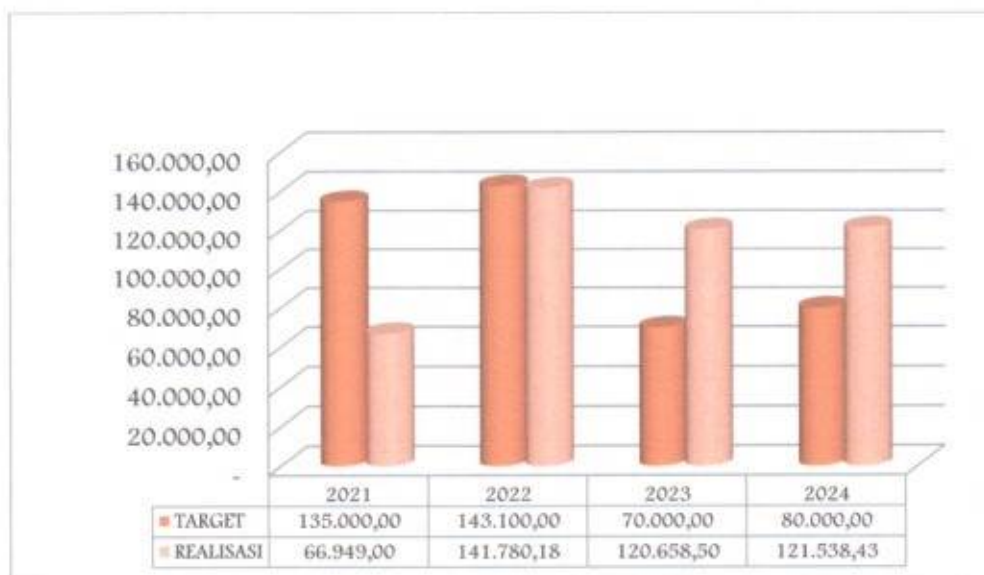
Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Grafik 3.7
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Realisasi Investasi PMA
Tahun 2021 – 2024



Sumber : Olahan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan Realisasi Investasi PMDN dari yang ditargetkan sebesar Rp. 11.711.482.400.000,- dapat direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 13.937.488.244.480,- atau sebesar 119,01% dengan tingkat capaian kinerja sangat tinggi. Formulasi terkait dengan indikator kinerja Realisasi Investasi PMA di Sumatera Barat diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n dengan Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Total Nilai Realisasi Investasi PMDN

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}}{\text{Target Nilai Realisasi Investasi PMDN tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{13.937.488.244.480,-}{11.711.482.400.000,-} \times 100\%$$

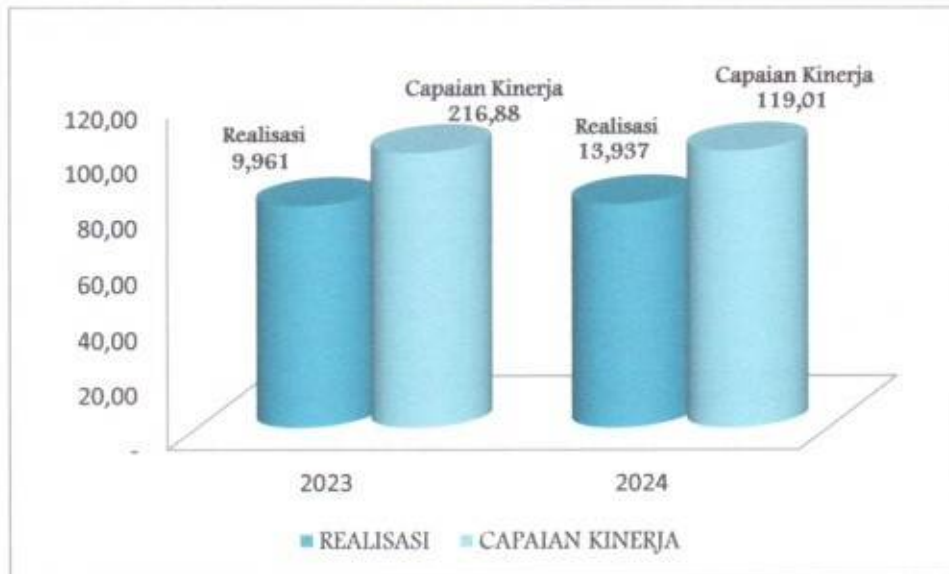
$$= 119,01\%$$

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator Nilai Realisasi Investasi PMDN, berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Secara nilai, Nilai realisasi investasi PMDN tahun 2024 dari sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dimana realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 13.937.488.244.480,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.975.711.044.480,- dibandingkan tahun 2023, dimana nilai realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 9.961.777.200.000,- dan capaian kinerjanya sebesar 119,01%

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 menurun sebesar 97,87% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebelumnya yakni sebesar 216,18%. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.8 berikut :

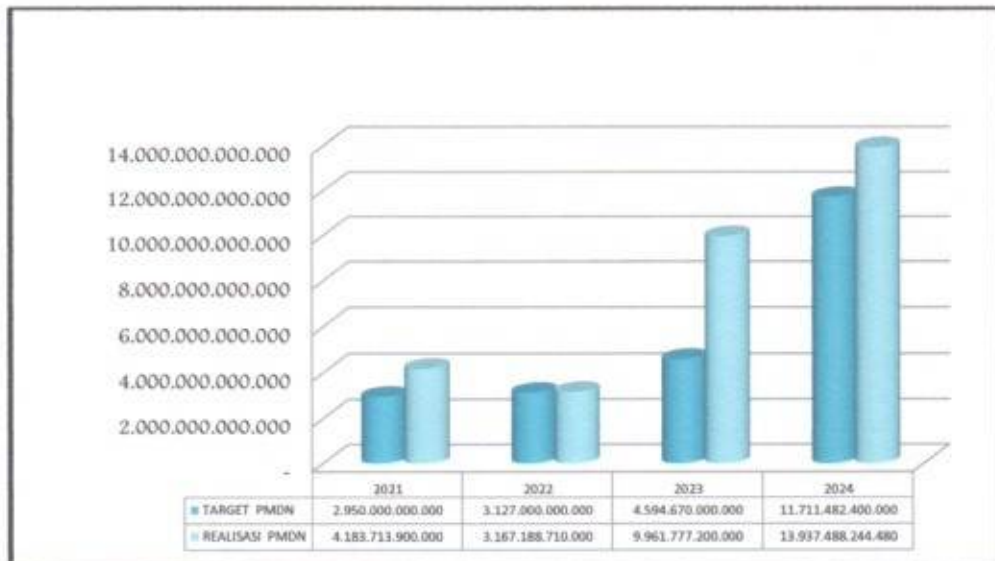
Grafik 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dari Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Realisasi Investasi PMDN
Tahun 2021 – 2024



Sumber : Olahan DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan Realisasi Tujuan dengan Target Rencana Strategis. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Sasaran Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai realisasi PMA dan PMDN. Untuk tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.6 dan terlihat dalam grafik 3.6 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN					
	PMA (ribu US\$)	80.000,00	121.538,43	151,92%	208.500,00	58,29%
	PMDN (juta Rp.)	11.711.482,40	13.937.488,24	119,01%	4.556.150,00	305,90%
	TOTAL (juta Rp.)	12.863.481,40	15.760.564,69	122,52%	7.558.550,00	208,51%
Rata - Rata Capaian Kinerja				122,22%		

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Terdapatnya perbedaan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dikarenakan ada penyesuaian target kinerja dengan melihat realisasi investasi tahun 2023 dan memperhatikan realisasi investasi PMA dan PMDN, namun secara total tidak merubah target pertumbuhan investasi yang menjadi target kepala daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.

Perbandingan Realisasi Investasi dengan Nasional dan Regional. Melihat perkembangan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN, baik itu secara regional dan nasional posisi Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024 masih berada di posisi terendah dalam realisasi investasi baik itu PMA maupun PMDN.

Peringkat Realisasi Investasi PMDN dan Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024, berada diperingkat ke 23 dari 38 Provinsi, dengan realisasi Investasi PMDN murni

sebesar Rp. 8,809 (milyar) dan ditambah dengan realisasi investasi UMK sebesar Rp. 5,128 (milyar). Peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMDN tahun 2023 naik 5 tingkat (peringkat 28), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat
Secara Nasional
Tahun 2021 – 2024

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	NASIONAL	22	24	28	23

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan untuk Realisasi Investasi PMA peringkat Provinsi Sumatera Barat secara Nasional berdasarkan lokasi, Provinsi Sumatera Barat berada diperingkat ke 25 dengan realisasi Investasi sebesar US\$. 121,54 (juta), peringkat ini dibandingkan dengan realisasi investasi PMA tahun 2023 naik 1 peringkat (peringkat 26), secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Peringkat Realisasi Investasi PMA Provinsi Sumatera Barat
Secara Nasional
Tahun 2021 – 2024

N O	URAIAN	PERINGKAT TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	NASIONAL	27	23	26	25

Sumber : Olahan Rumpun Penanaman Modal DPMPSTP Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan secara Regional Sumatera Peringkat Realisasi Investasi PMDN Provinsi Sumatera Barat , Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke 9 dengan realisasi Investasi sebesar Rp. 8,809 (milyar) dan ditambah dengan realisasi investasi UMK sebesar Rp. 5,128 (milyar) naik 1

PMDN, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan/inspeksi lapangan ke lokasi proyek untuk memastikan kondisi riil dan laporan yang diberikan oleh pelaku usaha, telah dilakukan ke lokasi proyek sebanyak 110 lokasi proyek ;
2. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang terjadi pada 22 kegiatan usaha;
3. Menyusun peluang investasi di Sumatera Barat dalam berbagai sektor;
4. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang kemudahan berusaha;
5. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi kemudahan berusaha, penyelesaian masalah kepada para pelaku usaha dengan jumlah peserta 1760 peserta serta pengisian laporan kemajuan penanaman modal (LKPM).
6. Memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro dan kecil.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Peningkatan Realisasi Investasi di Provinsi serta sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN selama tahun 2024, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Belum adanya Dukungan pemerintah kab/kota untuk memberikan kemudahan berusaha dalam bentuk revisi RTRW dan RDTR nya;
2. Belum tersedianya kebijakan strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;

3. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum mengerti tentang operasional OSS RBA dan LKPM;
4. Belum clear and cleannya tanah lokasi untuk berinvestasi, disebabkan di Sumatera Barat pada umumnya tanah ulayat;
5. Faktor kondisi alam, kondisi sosial dan kelembagaan wilayah potensi dan peluang investasi yang belum mendukung lokasi tersebut untuk kegiatan penanaman modal ke depannya;
6. Dukungan infrastruktur ke lokasi yang masih belum memadai serta aksesibilitas yang sulit dijangkau;

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta Target Tujuan dan Sasaran yang akan di capai.	1. Jumlah Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang ada, 4 orang Yang terdiri dari : 1 orang FPKPM ahli Madya dan 3 orang FPKPM Ahli Muda. 2. Calon Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang telah diusulkan Penyesuaian Jabatan 9 orang	Melibatkan semua SDM dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan di capai serta penyusunan Anjab dan ABK

2. Sarana dan Prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana

dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 15.760.564.694.480,- dari target Rp. 12.863.482.400.000,- dengan tingkat capaian sebesar 122,52%.

Didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program – Program yang ada di Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 2.253.395.938,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp 2.213.197.456,- atau sebesar 98,22%. Anggaran ini tersebar pada 3 (tiga) Program Urusan Penanaman Modal, yaitu yaitu (1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 588.991.507,- yang terdiri atas 2 kegiatan dengan 5 sub kegiatan, dan (2) Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp 229.436.531,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, (3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.434.967.900,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 2.253.395.938,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 122,52%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 2.213.197.456,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. 2.253.395.938,-} \times 122,52\%) - \text{Rp. 2.213.197.456,-}}{(\text{Rp. 2.253.395.938,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. 2.760.860.703,24} - \text{Rp. 2.213.197.456,-}}{(\text{Rp. 2.253.395.938,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 24,30\%$$

Maka nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah merupakan (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) dimana Nilai Efisiensi diperoleh dengan formula :

$$NE = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20 \times 50)$$

$$NE = 50\% + (0 / 20) \times 50$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (24,30\% / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 110,76\% \text{ dibulatkan } 100\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi dan sudah dikonversikan dengan skala 0% - 100% diperoleh nilai efisiensinya sebesar 110,76%, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2024 tingkat efisiensinya sebesar 100 % dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.253.395.938,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.213.197.456,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan capaian indikator kinerja baru sebesar 122,52 % pada tahun 2024 atau sebesar Rp. 15.760.564.694.480,-

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi sumber daya adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
2. Efisiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
3. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.12
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal	100%	100%	588,991,507	572,576,071	97.21%
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	19,227,225	19,124,375	99.47%
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	19,227,225	19,124,375	99.47%

				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase ketersediaan arah kebijakan umum penanaman modal dan peta potensi investasi yang lengkap	100%	100%	569,764,252	553,451,696	97,14%
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	79,149,398	78,926,846	99,72%
				Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada FIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	19 Kab/kota	19 Kab/kota	3,849,200	3,849,200	100,00%
				Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 dokumen	8 dokumen	134,398,000	134,358,400	99,97%
				Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	352,367,684	336,317,250	95,44%
				Program Promosi Penanaman Modal	-	5 dokumen	10 dokumen	229,436,531	226,982,950	98,93%
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Merjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pernyataan Minat	5 dokumen	10 dokumen	229,436,531	226,982,950	98,93%

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	182,947,404	182,030,650	99,50%
				Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	46,489,127	44,952,300	96,69%
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	12,8 T	15,7 T	1,434,967,900	1,413,638,435	98,51%
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	12,8 T	15,7 T	1,434,967,900	1,413,638,435	98,51%
				Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	124 Kegiatan usaha	126 Kegiatan usaha	527,942,400	511,416,535	96,87%

				Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	17 kegiatan usaha	22 kegiatan usaha	215,563,200	215,192,700	99,83%
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1370 Pelaku usaha	1540 Pelaku usaha	691,462,300	687,029,200	99,36%
TOTAL ANGGARAN								2.253.395.938	2.213.197.456	98,22%

Sumber : Catatan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis 2.**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu “ dilihat berdasarkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian kinerja indikator kinerja tersebut, seperti tergambar dalam tabel 3.5 berikut ini

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625 / 3,91	101,19% / 102,62 %
Rata – Rata Kinerja Sasaran Startegis 2				101,19 %

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Formulasi terkait dengan indikator kinerja Sasaran Strategis kedua yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh dari memperbandingkan Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n dengan Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n, seperti di bawah ini:

Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

$$= \frac{\text{Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}}{\text{Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun n}} \times 100\%$$

$$= \frac{97,625}{96,48} \times 100\%$$

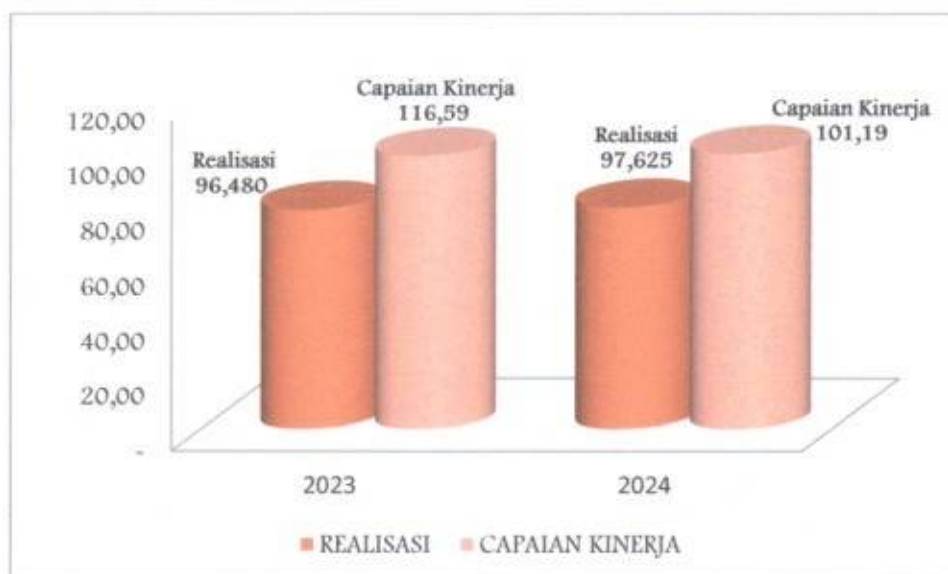
$$= 101,19\%$$

Sumber : DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel 3.8 di atas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang ditetapkan dengan hasil dengan hasil capaian kinerja Sangat Tinggi sebesar 101,19%, dimana Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diharapkan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2024, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan dengan nilai sebesar 96,48 dan dapat terealisasi sampai dengan kondisi triwulan 3 dengan nilai sebesar 97,625.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 1,145, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 96,48. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.10 berikut :

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024

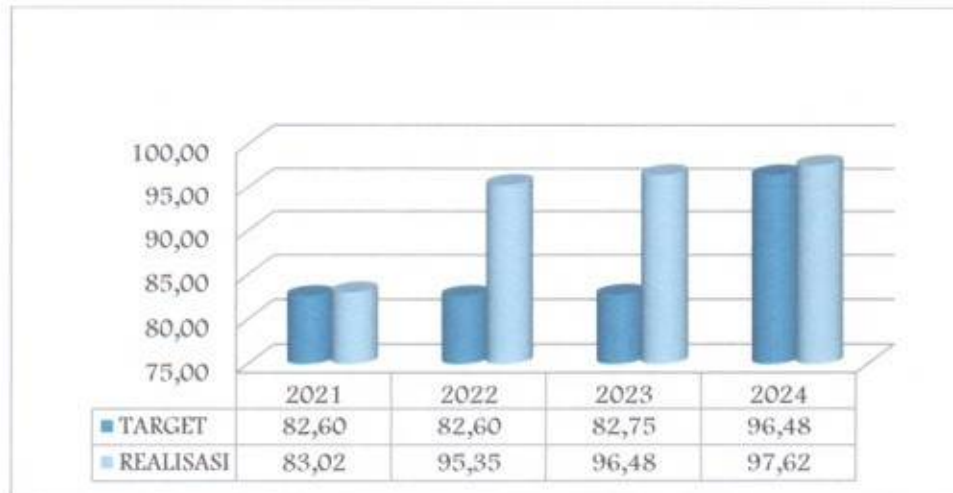


Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Grafik 3.11
Perbandingan Target, Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021 – 2024



Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Penetapan target kinerja indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai Indkes Kepuasan Masyarakat (IKM), berdasarkan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Perbandingan realisasi tujuan dengan Rencana Strategis. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Sasaran Strategis Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM). Untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebagaimana tergambar pada tabel 3.14 dan terlihat dalam grafik 3.9 berikut ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Kinerja
RPJMD/Renstra OPD 2021 - 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625 / 3,91	101,19% / 102,625%	83,20 / 3,47	117,34% / 112,68 %
Rata - Rata Capaian Kinerja				101,19%		

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Terdapatnya perbedaan target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena ada penyesuaian target kinerja melihat capaian realisasi tahun 2024 dan, namun tidak merubah target pertumbuhan investasi yang menjadi target kepala daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.

Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah penilaian yang dilakukan oleh pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan.

Terkait dengan capaian kinerja ini untuk pembandingan baik secara

nasional/Regional dan daerah, tidak ada data pembandingnya dikarenakan indikator yang digunakan berbeda atau tidak ada data pembandingnya.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi serta sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha dan OPD teknis terkait dengan kebijakan Perizinan dan Kemudahan Berusaha sekaligus penerbitan NIBnya, untuk tahun 2024 sesuai dengan alokasi anggaran telah dilakukan kepada 1.760 pelaku usaha Usaha Mikro Kecil;
2. Melaksanakan Pelayanan Langsung terhadap pelaku usaha yang terkendala dalam hal mengoperasikan system (aplikasi OSS) di Kantor / Front Office;
3. Terinformasikan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang informatif bagi para pelaku usaha baik secara langsung maupun lewat website DPMPTSP;

Hambatan dan kendala Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait penerbitan disebabkan oleh:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat, Khususnya Nelayan tentang Pengisian Format Responden serta Berubahnya Sistem dari Manual ke Online;

2. Masih terdapat gangguan atau kendala jaringan atau pengembangan aplikasi perizinan OSS oleh Pemerintah Pusat;
3. Masih rendahnya kemampuan aparatur penyelenggara terhadap penggunaan Teknologi Informasi (Layanan secara elektronik);
4. Terbatasnya jumlah aparatur penyelenggara perizinan;
5. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan;
6. Keterbatasan pelaku usaha atas perizinan secara online melalui OSS dan aplikasi perizinan berbasis web dan mengubah pola pikir masyarakat atas layanan secara tatap muka;
7. Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) masih belum sempurna dalam pengembangan sehingga terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan di daerah.

Untuk meningkatkan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang aturan – aturan yang selalu Berubah dengan Mengadakan Layanan Langsung kepada Pelaku Usaha;
2. Memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato dan OSS bagi masyarakat, pelaku usaha dan SKPD Teknis Terkait;
3. Meningkatkan kualitas layanan melalui pelayanan langsung kepada masyarakat;
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Kementrian / Lembaga terkait;
5. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan SKPD melalui Tim Teknis atau penyelenggara perizinan Provinsi Sumatera Barat;
6. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perizinan SIP Sakato terhadap perizinan yang tidak diatur pada OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas serta Target Tujuan dan Sasaran yang akan di capai.	1. Jumlah Fungsional Penata Perizinan yang ada 10 orang, terdiri dari FPP Ahli Madya 3 orang, FPP Ahli Muda 4 Orang dan FPP Ahli Pertama 3 orang.	Melibatkan semua SDM dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Target Kinerja Tujuan dan Sasaran yang akan di capai serta penyusunan Anjab dan ABK

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terealisasi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 97,625 dengan tingkat capaian sebesar 101,19%.

Didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program - Program yang ada di Urusan Penanaman Modal sebesar

Rp.1.166.829.476,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. 1.153.250.500,- atau sebesar 98,84%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) Program Urusan Penanaman Modal, yaitu yaitu (1) Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 1.129.881.914,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan, dan (2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp.36,947,562,- yang terdiri atas 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 1.166.829.476,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 101,19%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 1.152.250.500,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. 1.166.829.476,-} \times 101,19\%) - \text{Rp. 1.152.250.500,-}}{(\text{Rp. 1.166.829.476,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. 1.130.119.746,76} - \text{Rp. 1.152.250.500,-}}{(\text{Rp. 1.166.829.476,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0,02$$

Maka nilai efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah merupakan (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) dimana Nilai Efisiensi diperoleh dengan formula :

$$NE = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20 \times 50)$$

$$NE = 50\% + (0/20) \times 50$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,02 / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 56,10\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi dan sudah dikonversikan dengan skala 0% - 100% diperoleh nilai efisiensinya sebesar 56,10%, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun 2024 tingkat efisiensinya sebesar 56,10% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.166.829.476,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.152.250.500,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,19 % pada tahun 2024 atau sebesar 97,625

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi sumber daya adalah :

1. Efisiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
2. Efisiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
3. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi di Sumatera Barat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.15
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	96,48% / 3,81 86,36%	97,625% / 3,91 88 %	1,129,881,914	1,116,361,500	98,80%
				Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan – Undang – Undangan menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 4. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	96,48% / 3,81 86,36%	97,625% / 3,91 88 %	1,129,881,914	1,116,361,500	98,80%
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis	5 Pelaku usaha	5 Pelaku Usaha	192,066,626	190,908,850	99,40%

					Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Izin/ non izin	964 Izin/ non izin	692,058,488	681,664,740	98,50%
					Sub Kegiatan/Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik					
					Sub Kegiatan/Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					
						60%	60%	36,947,562	36,889,000	99,84%

				Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Technology Informasi	60%	60%	36,947,562	36,889,000	99,84%
				Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	36,947,562	36,889,000	99,84%

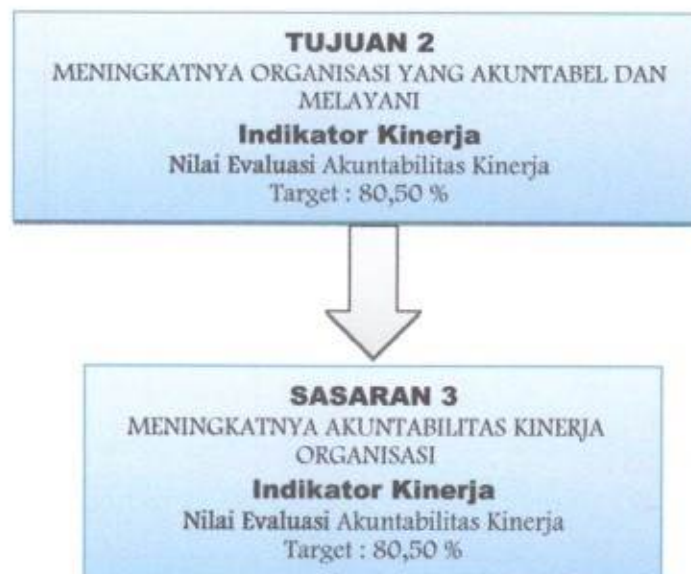
Sumber : Gajian DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

3.3.2. TUJUAN 2 MENINGKATNYA ORGANISASI YANG AKUNTABEL DAN MELAYANI

Tujuan ke-2 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 1 indikator kinerja tujuan yaitu (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja. Pencapaian kinerja tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024, sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas, dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2
Tujuan 2 , Sasaran Strategis 3 serta Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024



Penetapan target kinerja indikator tujuan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomr 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026.

Tabael 3.16
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,50	80,53	100,04%	80,82	99,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja				100,04%		

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa pencapaiantujuan kedua telah dicapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 100,04%. Jika dilihat pada target akhir Rencana Strategis, diprediksi target tujuan ini akan dapat tercapai.

Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 1 sasaran strategis yaitu(1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.Berikut analisis capaian sasaran kinerja pada tahun 2024.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
----------------------------	--

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.Pengukuran pencapaian sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dilakukan melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD. Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/09/LHE/INSP/2024tanggal 20 Juni 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 80,53% dengan

kategori A dari target sebesar 80,50% atau dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,04%. Nilai ini menunjukkan bahwa AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja handal.

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Kinerja
Tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani
Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,50% / A	80,53 % / A	100,04%
Rata – Rata Capaian Kinerja					100,04%

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja DPM & PTSP Tahun 2024

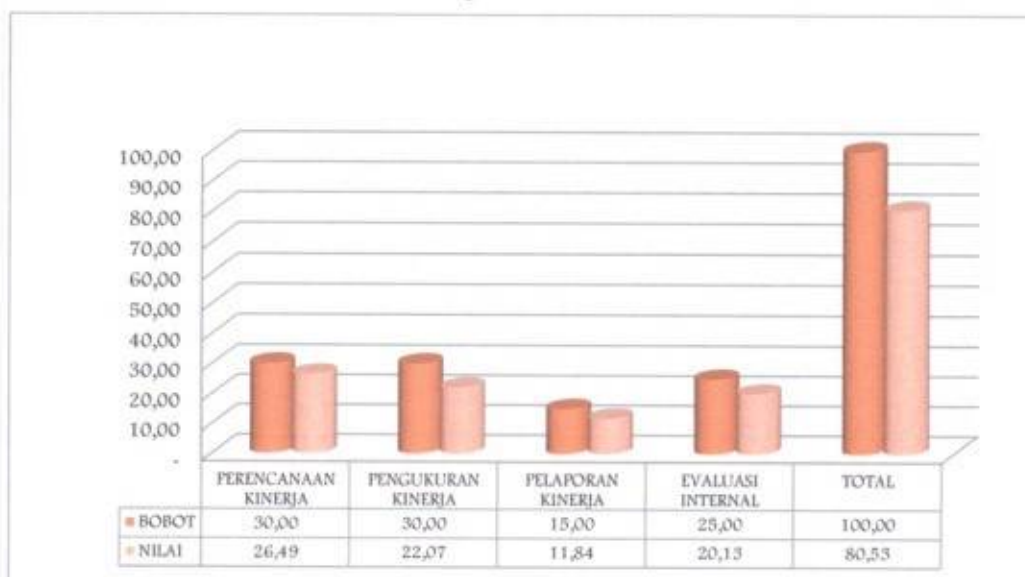
Formulasi terkait dengan capaian indikator kinerja tujuan kedua yakni Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diperoleh dari Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas tahun ndibagi dengan Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun n , seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun n}}{\text{Target Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun n}} \times 100\% \\
 & = \frac{80,53}{80,50} \times 100\% \\
 & = 100,04\%
 \end{aligned}$$

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Nilai Akuntabilitas Kinerja diukur dengan formula penghitungan penjumlahan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Provinsi SumateraBarat terhadap 4 (empat) komponen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai tertinggi pada komponen Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,49% dari bobot 30% dan komponen terendah adalah Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,84% dari bobot 15%. Berikut rincian komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun penilaian 2024:

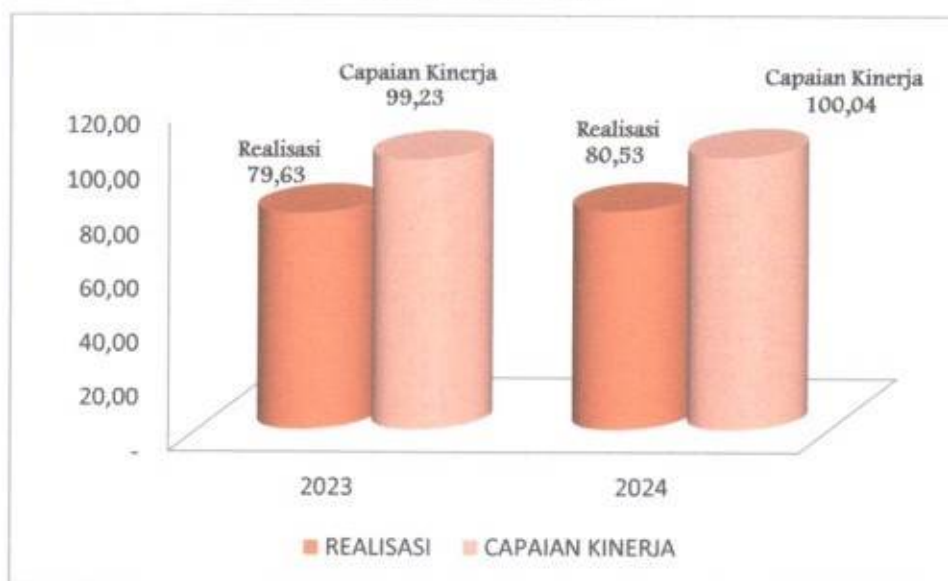
Grafik 3.12
Capaian Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Per Komponen Tahun 2024



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 ini meningkat dari nilai 79,64 menjadi 80,53 atau meningkat 0,89 point. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023-2024 dapat dilihat grafik 3.13 berikut :

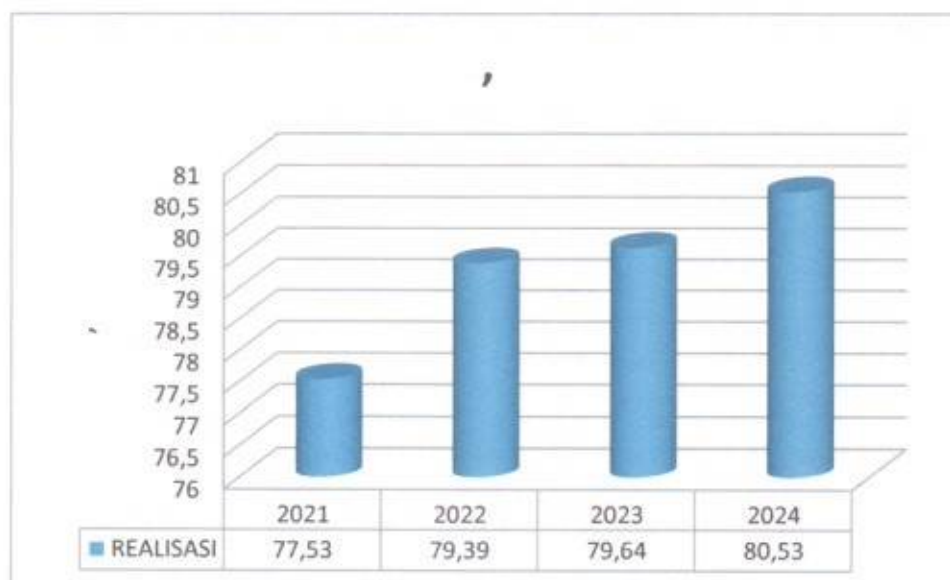
Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Tahun 2023 -2024



Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

Sedangkan Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

Grafik 3.14
Realisasi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Selama Tahun 2021 s.d Tahun 2024



Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Meskipun secara keseluruhan nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari seluruh komponen, terjadi penurunan nilai dari komponen Pelaporan Kinerja yaitu dari 13,48 pada tahun 2021 menjadi 11,84 pada tahun 2024 dimana turun sebesar 1,64 point. Dalam hal ini, untuk pelaporan kinerja tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi hasil evaluasi oleh Inspektorat.

Berikut secara detail dapat dilihat perbandingan nilai hasil evaluasi per komponen tahun 2021-2024, sebagaimana tampak pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.18
Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2024

NO	ASPEK KOMPONEN PENILAIAN	NILAI			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Perencanaan Kinerja	25,77	25,68	26,42	26,49
2.	Pengukuran Kinerja	20,45	21,15	21,08	22,07
3.	Pelaporan Kinerja	13,48	13,56	11,64	11,84
4.	Evaluasi Internal	8,00	7,96	20,50	20,13
5.	Pencapaian Kinerja	9,83	11,04	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		77,53	79,39	79,64	80,53
Kategori		BB	BB	BB	A

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

Tabel 3.19
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD/Renstra
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			TARGETA KHIRRPJ MD/ RENSTRA	CAPAIAN s.d Tahun 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RPJMD /RENSTRA (%)
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,50	80,53	100,04%	80,52	99,64%
Rata - Rata Capaian Kinerja				100,04%		

Sumber : Hasil Evaluasi SAKIP DPM & PTSP oleh Inspektorat, diolah

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2024 mendukung capaian target pada Renstra/RPJMD sebesar 100,04%. Sedangkan hingga akhir capaian RPJMD/Renstra Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD baru mencapai 99,64%. Hal ini berarti bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya serta komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi oleh seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mencapai target akhir RPJMD/Renstra terhadap indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.

Perbandingan Realisasi Sakip OPD dengan Sakip Provinsi. Sesuai dengan hasil evaluasi Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, hasil yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 80,53 (A) diatas nilai sakip Provinsi Sumatera Barat yang baru berada diangka 78,98 (BB).

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah dilakukan. Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, diantaranya :

1. Perencanaan Kinerja.

- a. Penetapan SK Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mengkoordinir peningkatan akuntabilitas kinerja secara berjenjang dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- b. Melakukan dialog kinerja agar masing-masing individu memiliki kontribusi yang terukur dalam pencapaian kinerja organisasi;

- c. Menyusun SKP dan Rencana Aksi individu yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja;
 - d. Melakukan penyempurnaan cascading kinerja secara berjenjang untuk memudahkan dalam menyusun MPH setiap individu;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Aksi dan tindak lanjut Rencana Aksi;
 - f. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
2. Pengukuran Kinerja.

Sudah Memanfaatkan e-sakip untuk pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
 - a. Sudah Memutakhirkan Pelaporan Kinerja sesuai hasil rekomendasi SAKIP dengan menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja serta membandingkan dengan hasil realisasi sebelumnya dan membandingkan dengan realisasi nasional untuk semua indikator kinerja sasaran;
 - b. Pada pelaporan kinerja telah disajikan perhitungan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam bentuk data rill dengan menggunakan perhitungan tingkat efisiensi sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
 - a. Melaksanakan Rapat Evaluasi Progress Kerja Tim Akuntabilitas Kinerja pada masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Rencana Aksi, Capaian Sasaran Renstra, Capaian Sasaran Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan, Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala setiap awal bulan.

- c. Memanfaatkan e-sakip untuk penginputan hasil evaluasi capaian kinerja.

Disamping upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mencapai keberhasilan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2024, juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran kinerja ini, diantaranya :

1. Dialog kinerja belum maksimal disebabkan adanya perubahan regulasi.
2. Belum optimalnya implementasi SPIP secara menyeluruh di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka dalam menyusun konsep Perencanaan dan Penganggaran internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sering diabaikan resiko dari penempatan penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif upaya tindak lanjut, diantaranya :

1. Melakukan dialog kinerja secara berjenjang disertai dengan perbaikan terhadap pohon kinerja dan cascading kinerja;
2. Memastikan Komitmen bersama melakukan perbaikan penerapan akuntabilitas kinerja diseluruh jajaran mulai dari Eselon 2 hingga Staf;
3. Mendorong semua ASN secara bersama - sama dengan Sekretariat menyusun rencana aksi;

4. Membuat fokus substansi kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja dan memberikan penganggaran sesuai dengan prioritas;
5. Meningkatkan kualitas kinerja ASN sampai ke level individu;
6. Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan /triwulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
7. Mengendalikan dan mengevaluasi implementasi peta proses bisnis secara berkala;
8. Menyepakati jadwal rapat antar pimpinan, agar Rapat pengendalian dan evaluasi kinerja dihadiri oleh semua pihak;
9. Memaksimalkan peran agen perubahan sebagai penggerak perubahan dengan melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan rencana kerjanya;
10. Memastikan segala kebijakan terkait penerapan Reformasi Birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level individu.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup :

1. Sumber daya manusia yang kompeten.

Kondisi Ideal	Kondisi Saat	Tindak Lanjut
Sebanyak 48 ASN SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan bisa memahami dan menguasai SAKIP	Sistem AKIP baru dipahami secara maksimal pada level Struktural, Fungsional Perencana dari total ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan semua tim SAKIP pada seluruh unit kerja dimasing-masing bidang untuk bisa memahami SAKIP dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Kondisi saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pencapaian target kinerja belum cukup memadai. Tindak lanjut kedepan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing individu dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

3. Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 80,53% dari target 80,50% dengan tingkat capaian sebesar 100,04%, didukung dengan anggaran APBD/P Provinsi Sumatera Barat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp.12,080,421,640,- dan telah terealisasi sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. 10,494,245,523,- atau sebesar 86,87%. Anggaran ini tersebar pada 2 (dua) kegiatan utama dengan 5 sub kegiatan utama yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan yaitu: (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan yaitu: (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD; dan (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 12,080,421,640,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 100,04%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 10,494,245,523,-

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{(\text{Rp. 12,080,421,640,-} \times 100,04\%) - \text{Rp. 10,494,245,523,-}}{(\text{Rp. 12,080,421,640,-})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \frac{\text{Rp. 12.085.253.808,656} - \text{Rp. 10,494,245,523,-}}{\text{Rp. 12,080,421,640}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Kinerja} = 0,13\%$$

Dari hasil perhitungan Tingkat Efisiensi diatas, untuk mengetahui berapa nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” perlu dilakukan konversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (0,13 / 20) \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 82,93\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sampai dengan triwulan 3 sebesar 18,61% dalam menggunakan anggaran sebesar Rp.12,080,421,640,- yang terealisasi sebesar Rp. 10,494,245,523,- untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,04% atau dengan nilai sebesar 80,53, serta berhasilnya capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta berkat dukungan 5 (lima) sub kegiatan utama yang ke 5 (lima) targetnya terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan dapat terealisasi 100%.

Disamping uraian diatas, langkah – langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan dalam rangka efisiensi sumber daya adalah :

4. Efisiensi dalam penggunaan Alat tulis kantor.
5. Efisiensi dalam melaksanakan Perjalanan dinas yang lebih selektif.
6. Membatasi belanja – belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan utama dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, sebagaimana terlihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.20
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pada Sasaran Strategis
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang, Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	100%	12.080.421.640	10.494.245.523	97,31%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85%	85%	153.119.408	147.130.900	96,09%
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	109.387.750	104.607.500	95,63%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7 laporan	7 laporan	43.731.658	42.523.400	97,24%

			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	124.281.786	108.623.197	87,40%
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90 paket	90 paket	67.500.000	65.736.000	97,39%
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	12 orang	56.781.786	42.887.197	75,53%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.303.371.718	1.237.825.484	94,97%
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	17 paket	20.981.400	17.680.000	84,27%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.347.110	10.337.700	99,91%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 paket	32 paket	91.252.000	81.113.200	88,89%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5 paket	34.170.000	30.317.080	88,72%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 dokumen	17.080.000	17.010.000	99,59%

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89 laporan	89 laporan	958.533.240	922.629.200	96,25%
					Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	171.007.968	158.738.304	92,83%
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	102.899.180	100.757.280	97,92%
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit	71.745.800	71.745.800	100,00%
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	6 unit	6 unit	31.153.380	29.011.480	93,12%
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.014.407.000	966.348.688	95,26%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	146.370.900	140.908.119	96,27%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	868.036.100	825.551.614	95,09%

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	100%	355.160.224	348.551.614	98,14%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	257.740.000	253.232.614	98,25%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 unit	22 unit	11.000.000	9.900.000	90,00%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	46 unit	22.810.224	21.965.000	96,29%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	63.610.000	63.454.000	99,75%

Sumber : Olahan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

3.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran melalui Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.15.500.647.054,-. Anggaran tersebut tersebar di 6 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Hingga akhir Tahun 2024, dari pagu sebesar Rp. 15.500.647.054,- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.13.860.693.479,- atau sebesar 89,42%. Adapun perkembangan realisasi setiap bulannya dibanding dengan target penyerapan dapat dilihat pada grafik 3.13 berikut

Grafik 3.15.
Perkembangan realisasi setiap bulannya
dibanding dengan Target Penyerapan



Sumber : <https://simbangda.sumbarprov.go.id/dashboard>

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa secara umum capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 belum mencapai target

penyerapan setiap bulannya. Terlihat adanya gap antara target dan realisasi disetiap bulannya, hingga pada akhir 2024 gap tersebut semakin kecil yaitu sebesar sebesar (-) 6,83%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing PPTK di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi anggaran yang dibuat. Untuk memperbaiki keadaan ini, sangat dibutuhkan komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga mampu melakukan penyerapan anggaran dengan optimal mendekati target yang direncanakan.

Realisasi Anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja. Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.21

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi FMA dan PMDN	12.863.482.400,000	15.760.564.694.480	122,52%	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU, PENANAMAN MODAL	588.991.507	572.476.071	99,98%
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	229.436.531	226.982.950	99,93%
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.434.967.900	1.413.638.435	98,51%
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.129.881.914	1.116.361.500	98,80%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81	97,625 / 3,91	101,19%	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL	36.947,562	36.889.000	99,84%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,50 / A	80,53 / A	100,04%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.080.421,640	10.494.245,523	86,87%
TOTAL PAGU							15.500.647.054	13.860.693.479	89,42 %

Sumber : Realisasi Perjanjian Kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, data diolah

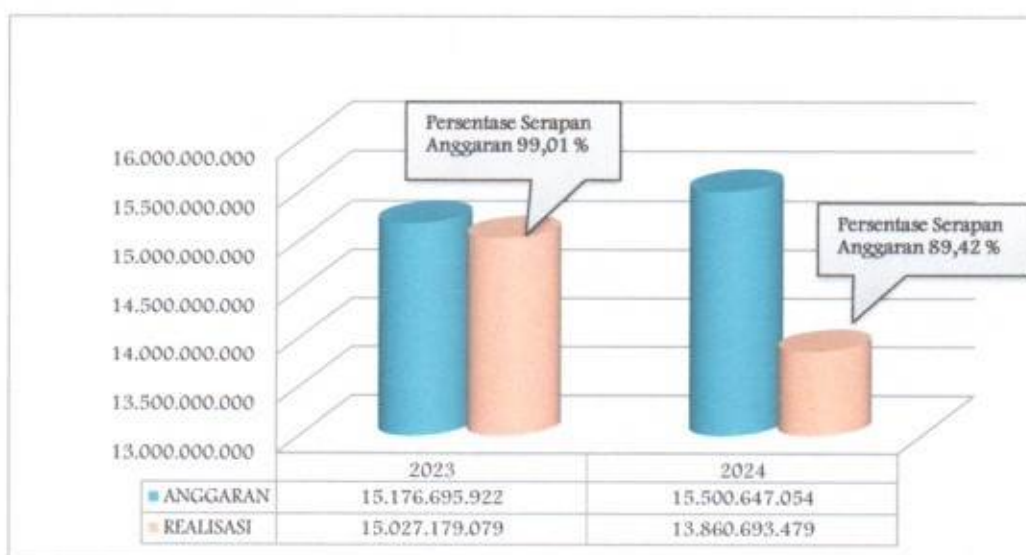
Berdasarkan tabel 3.21 di atas, diketahui bahwa :

1. Dengan penggunaan anggaran sampai akhir tahun 2024 sebesar 89,42% yang tersebar di 6 program dapat tercapai kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,91%. Hal ini bisa diartikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam pencapaian target 3 (tiga) sasaran kinerja yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN, sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.
2. Pada tahun 2024, serapan anggaran terbesar ada pada Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan serapan sebesar 99,84%, kemudian diikuti oleh Program Promosi Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 98,93%, Program Pelayanan Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 98,80%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 98,51, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan serapan anggaran sebesar 97,21% dan terakhir Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan serapan anggaran baru sebesar sebesar 86,87%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2023, capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,59%, dimana realisasi

anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 89,42% dan ditahun 2023 hanya 99,01% sebagaimana tergambar pada grafik 3.16 berikut.

Grafik 3.16
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran
DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 – 2024



Sumber : Hasil analisis kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian realisasi anggaran di tahun 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan beberapa alternatif tindak lanjut, antara lain :

1. Membuat form pengendalian terhadap rencana aksi pada masing-masing sub kegiatan;
2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana penarikan dana secara detail sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di akhir tahun dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah dibuat;

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran strategis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Sebagai Instansi yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat berusaha menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 yang secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa penyempurnaan langkah-langkah aksi pada masa yang akan datang. Dari Laporan Kinerja pada tahun 2024 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024 memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 1 (satu) tujuan daerah yang diukur

oleh 1 (satu) indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026.

Dari Laporan Kinerja pada tahun 2024 ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, tahun 2024, juga memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang diukur oleh 3 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 serta perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.
2. Untuk pencapaian 2 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama OPD, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.420.225.414,- atau sebesar 22,07% dari total anggaran belanja tahun 2024 sebesar Rp. 15.500.647.054,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.366.447.956,- atau sebesar 98,42%.
3. Tujuan pertama yang menjadi Indikator Kinerja Daerah “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” dengan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Investasi di Provinsi menampakkan kinerja yang sangat bagus bagus karena didukung dengan pembinaan kepada UMK. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebesar 9,50%, dapat direalisasikan sebesar 34,16% dengan hasil Sangat Tinggi, yang mana capaian kinerjanya mencapai 359,58% atau meningkat 13,55 dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 20,61% realisasinya .
4. Tujuan kedua “Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani” dengan indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD” dengan hasil kinerja Sangat Tinggi dengan capaian kinerja sebesar 100,04% dengan hasil A (80,53) dari target direncanakan A (80,50).
5. Kategori keberhasilan dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator, adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat tinggi, karena capaian kinerjanya >100%, yakni sebesar 101,19%.
- b. 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni “Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat Tinggi, karena capainnya kinerjanya 122,52%.
- c. 1 (satu) Indikator Kinerja OPD, yakni “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” dimana capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator tersebut direalisasikan dengan hasil Sangat Tinggi, karena capainnya kinerjanya 100,04%.

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

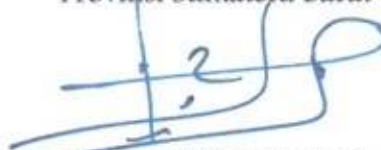
Sistem Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Target*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembagunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai *stakeholders*. Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, antara lain:

1. Merumuskan arah Investasi;
2. Membuat turunan dari peraturan yang ada;
3. Melaksanakan Sosialisasi dalam hal Penyelenggaraan Kemudahan Perizinan Berusaha terhadap OPD dan Pelaku Usaha;
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terhadap OPD teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan teknis terhadap Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
6. Melakukan Pengawasan dan Inspeksi / Pengawasan Ke lapangan / perusahaan dalam hal meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal;
7. Menyiapkan Kebijakan Strategis yang mendorong calon investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat;
8. Membuat Pemetaan terhadap Target Investasi
9. Melakukan Rekonsiliasi Data Potensi dan Peluang Investasi setiap periodik bersama stakeholder terkait;
10. Tetap melakukan pengembangan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP;
12. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penganggaran..

Padang, Januari 2025

Kepala DPMPTSP
Provinsi Sumatera Barat



ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197304131997031001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Setia Budi No.15.Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dprptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,



MAHYELDI

Padang, Desember 2024

PIHAK PERTAMA,



ADIB ALFIKRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001

PERJANJIAN KINERJA

**OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	1.1	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN PMA (ribu US \$) * PMDN (Rp.) Total (Rp.)	80.000 11.711.482.400.000 12.863.482.400.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,48 / 3,81
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3.1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,50 / A

*) 1 US \$ = Rp. 14.400,-

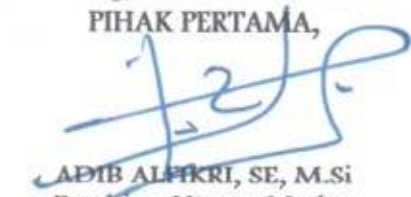
No	Program	Anggaran	Keterangan
I. ANGGARAN APBD		15.500.647.054,-	
I.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.080.421.640,-	APBD
I.2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	588.991.507,-	APBD & DAK NON FISIK
I.3	Program Promosi Penanaman Modal	229.436.531,-	APBD
I.4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.129.881.914,-	APBD
I.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.434.967.900,-	APBD & DAK NON FISIK
I.6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.947.562,-	APBD
II. ANGGARAN APBN		337.173.000,-	
II.1	Program Penanaman Modal	252.689.000,-	DEKON KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM RI
II.2	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	84.484.000,-	DEKON KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TOTAL		15.837.820.054,-	APBD & APBN

Padang, Desember 2024

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI


ADIB ALFIRI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197304131997031001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Setia Budi No.15, Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342

<http://dpmptsp.sumbar.go.id>

PADANG

RINCIAN PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT
INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NEGARA	NILAI INVESTASI (Dalam Ribu US\$)
1	2	3	4	5
1	PT. PERKEBUNAN PELALU RAYA	Padang Tarok Jorong Tapian Kandis Kabupaten Agam	Malaysia	23.550,09
2	PT. USAHA SAWIT MANDIRI	Jorong Simpang Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	22.109,32
3	PT. KENCANA SAWIT INDONESIA	MULTIVISION TOWER LANTAI 15, JL. KUNINGAN MULIA BLOK 9 B Kabupaten Solok Selatan	Singapura	11.320,81
4	PT. BERKAT SAWIT SEJAHTERA	Km. 09 Dusun Damai Rejo Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	8.276,20
5	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1 Lantai 1-23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 Kota Padang	Singapura	5.555,53
6	PT. SUPREME ENERGY MUARA LABOH	Menara Sentra Li. 23, Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, Kebayoran Baru Kabupaten Solok Selatan	Jepang	4.860,96
7	PT. TIRTA INVESTAMA	RDTX Place Lantai 5-9, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 3 Kabupaten Solok	Singapura	4.847,92
8	PT. SUMBAR ANDALAS KENCANA	Jalan Diponegoro Nomor 7 Kabupaten Pesisir Selatan	Singapura	4.101,16
9	PT. AGROWIRATAMA	SPRING TOWER 06-61 JL. K.L. YOS SUDARSO Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	3.335,83
10	PT. HITAY DAYA ENERGY	PLAZA OFFICE TOWER LT. 41, UNIT A1 & B2, JL. MH THAMRIN KAV 28-30 Kabupaten Solok	Singapura	2.751,63
11	PT. DAYA INDAH ANUGERAH	MR DIY FS Ruko Sungai Kambut Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	2.572,69
12	PT. INDOSAT	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, ~Kel. Gambir, Kec. Gambir Kota Padang	Singapura	2.397,65
13	PT. DEMPO SOLSEL ENERGI	Jl. TIM-TIM BLOK Y NO. 1 Kabupaten Solok Selatan	R.R. Tiongkok	2.334,63
14	PT. DAYA INDAH INTISAR	MR DIY FS Ruko Kampai Tibu Karambia Lubuk Sikarah Solok (XBLA) Kota Solok	Malaysia	2.213,76
15	PT. XL AXIATA	XL Axiata Tower Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 11-12, RT. 007/RW. 002, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Kota Padang	Malaysia	1.964,20
16	PT. DAYA INDAH SEJAHTERA	MR DIY FS Ruko Sungai Sapih Kurangi Padang (XPH) Kota Padang	Malaysia	1.730,55
17	PT. PADANG RAYA CAKRAWALA	Jl. Palembang Kav. 35-37 Kota Padang	Singapura	1.386,40
18	PT. AMP PLANTATION	Desa Tapian Kandis Kabupaten Agam	Mauritius	1.235,38
19	PT. GUNUNG SAWIT ABADI	BANCAH RAMBAI Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	1.052,01
20	PT. GERSINDO MINANG PLANTATION	Desa Tanjung Pangkal Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	890,44
21	PT. CHANG JUI FANG INDONESIA	JALAN RAYA LOSARANG KM 71, DUSUN PANGKALAN RT 01, RW 01, PANGKALAN Kota Padang	R.R. Tiongkok	881,50
22	PT. FIVE STAR MENTAWAI	Jl.pulau karam no.96c Kabupaten Kepulauan	Hungaria	723,74
23	PT. INDIES TRADER MARITIM	JALAN. TAN MALAKA Kota Padang	Australia	683,90
24	PT. INCASI RAYA	Jl. DIPONEGORO NO. 7 Kabupaten Dharmasraya	Hongkong, RRT	618,00
25	PT. ANDALAS AGRO INDUSTRI	APL Tower Lantai 11 Unit 6, ~Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, ~Kel. Tanjung Duren Selatan, ~Kec. Grogol Petamburan Kabupaten Pasaman Barat	Seychelles	474,21
26	PT. DHARMASRAYA LESTARINDO	JORONG KOTO PADANG Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	462,02
27	PT. SERINDO UTAMA JAYA	JALAN ACHMAD YANI Kabupaten Kepulauan	Malaysia	426,70
28	PT. BUKIT SAWIT SEMESTA	Jorong Pasar Darian Kabupaten Agam	Malaysia	400,30
29	PT. MULTI TRADING PRATAMA	Jl. LURE NO. 7 Kota Padang	Amerika Serikat	370,00
30	PT. HITAY BALAI KABA ENERGY	The Plaza Office Tower, Lt. 41 Unit A1 & B2, ~Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30, ~Kel. Gondangdia, Kec. Menteng Kabupaten Agam	Singapura	368,68
31	PT. ANDALAS WAHANA BERJAYA	APL Tower Lantai 11 Unit 6, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28 Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	347,33

32	PT. ABAISIAT RAYA	JL. RAYA PADANG-PAINAN KM.9, RT/RW 02/01 Kota Padang	Singapura	341,47
33	PT. SURF PLAYA MENTAWAI	JALAN KP. SEBELAH I NO. 14 D Kabupaten Kepulauan	Perancis	341,30
34	PT. MENTAWAI OMBAK BIRU	Dusun Jati Kabupaten Kepulauan	Belanda	336,70
35	PT. SELO KENCANA ENERGI	GEDUNG CITYLOFTS UNIT 1711, JL. KH. MAS MANSYUR KAV. 21 JAKARTA 10220 Kabupaten Solok Selatan	Belanda	333,22
36	PT. INDONESIA OCEAN GROUP	Jl. Tanah Lot, Br. Bahugaing Kabupaten Kepulauan	Perancis	323,52
37	PT. BARRACUDA RAJA OMBAK	Dusun Katiet Kabupaten Kepulauan	Italia	319,24
38	PT. ONU MENTAWAI INTERNASIONAL	DUSUN KATIET Kabupaten Kepulauan Mentawai	Perancis	310,04
39	PT. MENTAWAI LAND VENTURES	Jalan Sri Rama 5 (Jl. Periodean Jembatan Naga Nomor 5, Jalan Sri Rama, Banjar/Lingkungan Leguan Keledj) Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	303,42
40	PT. MUARA SAWIT LESTARI	JL. PEMUDA NO.102 C Kabupaten Pesisir Selatan	Malaysia	260,86
41	PT. SUNSET ISLAND PROPERTIES	Jalan Veteran Gang Jempinis, Nomor 17, Banjar Uma Kepuh Kabupaten Kepulauan Mentawai	Slovenia	242,10
42	PT. DRIFTWOOD RESORT MENTAWAIS	Istana Kuta Galeria Blok BW 2 No. 3A Jl. Patih Jelantik Kabupaten Kepulauan Mentawai	Belgia	227,45
43	PT. MENTAWAI PARADISE INVESTMENTS	DUSUN KATIET Kabupaten Kepulauan Mentawai	Uruguay	219,80
44	PT. SIBON EXPLORER SUMATRA	Jl. Pulau Karam No. 96 C Kota Padang	Brasil	200,00
45	PT. SONGKET BERNHARD BART	Jorong Panca Nagari Kabupaten Agam	Swiss	191,06
46	PT. MAIA MENTAWAI INTERNATIONAL	DUSUN KATIET Kabupaten Kepulauan Mentawai	Brasil	176,55
47	PT. NASARA INTERNATIONAL PROJECTS	Jl. Kampung Baru No. 22 Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	139,15
48	PT. DAPUR SOLO MUSTIKA NUSANTARA	Ruko Golden 8 Jl. Panjang No. 8 CDE Kota Padang	Hongkong, RRT	139,07
49	PT. MENTAWAI TIDELINE ACCOMMODATION	Dusun Katiet Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	133,70
50	PT. PEAK INTERNATIONAL CONSULTING	Jl. Batang Arau No. 66 Kota Padang	Amerika Serikat	112,30
51	PT. PERMATA HIJAU PASAMAN	DESA PADANG HARAPAN PO BOX 11 Kabupaten Pasaman Barat	Mauritius	111,95
52	PT. INVESTMENT INDO LAND	Jalan Bikini No. 1 Kabupaten Kepulauan	Selandia Baru	91,30
53	PT. WIRA INNO MAS	SPRING TOWER 03-34, JL.KL YOS SUDARSO Kota Padang	Singapura	85,12
54	PT. USAHA INTI PADANG	KAWASAN INDUSTRI PADANG LOT NS. 9 Kabupaten Padang Pariaman	Singapura	83,73
55	PT. SUMATERA TROPICAL SPICES	JLN RAYA PADANG BUKITTINGGI KM.24 PASAR USANG Kabupaten Padang Pariaman	Amerika Serikat	80,75
56	PT. INDONESIA SOLVE SOLUTION	Jalan Bikini No. 1 Kabupaten Kepulauan	Rusia	73,46
57	PT. PRAYA CHARTER SUMATERA	Jalan Pulau Karam Nomor 92 Petak IV Kota Padang	Brasil	72,40
58	PT. INDOJAYA SENTOSA PERMAI	JALAN BY PASS KM.15 Kota Padang	R.R. Tiongkok	70,90
59	PT. DEEP SEA SAMUDRA	DUSUN MONGAN BOSUA Kabupaten Kepulauan	Amerika Serikat	69,71
60	PT. SULU MENTAWAI SOCIETY	DUSUN KATIET Kabupaten Kepulauan	Australia	67,67
61	PT. MENTAWAI SURF RETREAT SUMATERA	Jalan Pulau Karam nomor 92 Petak IV. Kabupaten Kepulauan Mentawai	Selandia Baru	66,70
62	PT. VILLA SUNFLOWER MENTAWAI	DUSUN KATIET Kabupaten Kepulauan	Australia	66,67
63	PT. MATAHARI TERBENAM	DESA BOSUA, TUNANG PASALATAT, SIFORA SELATAN. KEP. MENTAWAI SUMBAR Kabupaten Kepulauan Mentawai	Afrika Selatan	64,97
64	PT. PRIMATAMA MULIAJAYA	Multivision Tower Lt. 15 Jl. Kuningan Mulia Blok 9B Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	63,80
65	PT. MIND SET LOGISTICS	Jalan Bikini nomor 1 Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	58,40
66	PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA	Multivision Tower Lt. 12 Jl. Kuningan Mulia Blok 9B Kota Padang	Singapura	57,30
67	PT. SARAINA SURF CHARTERS	Jalan Nipahi Nomor 46H Kota Padang	Brasil	54,80
68	PT. ANDALAS SUMBER LESTARI	Jalan Purus V Nomor 1 Lantai 2 Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	54,60
69	PT. WEST SUMATRA INDAH	Jl Parak Gadang Komp Pondok Indah NO. B/12 Padang Kota Padang	Australia	53,50
70	PT. DAYA INDAH CENDANI	GEDUNG AIA CENTRAL LT 25, JL. JENDERAL SUDIRMAN KAV. 48A Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	53,33
71	PT. STARONE MITRA TELEKOMUNIKASI	JL. PEMUDA NO.142 Kota Padang	Singapura	51,30
72	PT. PANCA BOGA PARAMITA	Ruko Golden 8 Jl. Panjang No. 8 CDE Kota Padang	Hongkong, RRT	50,70

73	PT. LAILU MANAGEMENT GROUP	Jalan Kelenteng Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Malaysia	48,42
74	PT. BEVYS SUMATRA	Jl. Parak Gadang, Perum Pondok Indah No. B12	Kota Padang	Australia	47,60
75	PT. PULAU NINA INVESTMENT	DUSUN KATIET	Kabupaten Kepulauan	Argentina	42,30
76	PT. LAUTAN DAMAI	JL. WR MONGONSI NOMOR 14 J, KOTA PADANG	Kota Padang	Perancis	42,00
77	PT. TWIN PALMS MENTAWAI	Pantai Jati, Dusun Jati	Kabupaten Kepulauan	Australia	41,58
78	PT. SEGARA WISATA NUSANTARA	Jalan HOS Cokroaminoto Dalam Blok 29 B	Kota Padang	Amerika Serikat	41,27
79	PT. MIA OCEAN LYFE	Baku-Baku	Kabupaten Kepulauan	Australia	40,00
80	PT. TANAH ESTATE DEVELOPMENTS	Jl. Mertanadi No. 86E	Kabupaten Kepulauan	Australia	39,20
81	PT. MENTS LOCAL VENTURES	Kilometer 4	Kabupaten Kepulauan	Australia	34,41
82	PT. THE INDIGO CONSULTANCY	Jl. Ujung Belakang Olo 24	Kota Padang	Kanada	29,97
83	PT. SURF PHOTO LIFE	Jl. Bikini NO. 1	Kabupaten Kepulauan	Brasil	29,10
84	PT. BELA SULU MENTAWAI	DUSUN KATIET,	Kabupaten Kepulauan	Perancis	28,12
85	PT. AJINOMOTO SALES INDONESIA	Jl. Laksa Yes Sudarso No. 77-78	Kota Padang	Jepang	28,07
86	PT. CALMIC INDONESIA	SOUTH QUARTER TOWER B LT.21 UNIT E, F, G & H JL.RA.KARTINI KAV.8	Kota Padang	Inggris	27,77
87	PT. LET ITFLOW INVESTMENT	Jalan Bikini Nomor 01	Kabupaten Kepulauan	Australia	23,88
88	PT. JAYA TENGIRRI	JL. BATANG ARAU BLOK K NO. 9, PADANG	Kota Padang	Australia	21,97
89	PT. PANTAI HAI IRIE	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Peru	19,80
90	PT. PERMATA EMERALD INDAH	Perumahan Jabai Rahma Lestari Blok A Nomor 1	Kota Padang	Korea Selatan	18,71
91	PT. PERKERBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN	Desa VI Koto, Anam Koto Selatan, Kec. Kinali	Kabupaten Pasaman Barat	Inggris	18,00
92	PT. EDEN INTERNATIONAL BUSINESS	Jl. Bikini No. 1	Kabupaten Kepulauan	Brasil	17,00
93	PT. IMAGINE AND BELIEVE VILLAS	Jalan Bikini Nomor 1	Kabupaten Kepulauan	Australia	16,40
94	PT. HILON SUMATERA	Jl. Letjen Jamin Ginting Km. 11 No. 64.A, Kel. Simpang selayang, Kec. Medan Tuntungan	Kota Padang	Korea Selatan	15,90
95	PT. MAYZAL SOLEIL LAUBURU	Jalan Pura Uluwatu, Banjar Karang Boma	Kabupaten Kepulauan	Peru	15,40
96	PT. MENTAWAI SURF CHARTERS	AR. HAKIM NO. 46 B	Kota Padang	Brasil	14,60
97	PT. TAWADA HEALTHCARE	Rukan Permata Senayan Blok A18-19 Lantai 1-2 Jl. Tentara Pelajar No. 5	Kota Padang	Singapura	13,13
98	PT. CARPE DIEM MEDIA	Jl. Bikini No.01	Kabupaten Kepulauan	Perancis	12,50
99	PT. HOLLOW TREE VILLA	DUSUN KATIET	Kabupaten Kepulauan	Swiss	12,40
100	PT. MENTAWAI SURF COLLECTIVE	Jalan Kampung Terandam Nomor 60	Kota Padang	Inggris	12,10
101	PT. DEEP SIX CREW	Jalan Kampung Terandam Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	11,83
102	PT. MEDIA CONSULTANCY SERVICES	Jl. Bikini No. 01	Kabupaten Kepulauan	Amerika Serikat	11,10
103	PT. WIRATANU PERSADA TAMA	Gedung Gajah Blok A,B,C lantai 3A, Unit B IV Jl. Saharjo No. 111	Kota Padang	Spanyol	10,86
104	PT. TROPICAL DESIGNED PROPERTIES	JLABIMANYU NO. 999	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	10,85
105	PT. PULAU OMBAK INDAH	KOMPLEK BATANG KABUNG ASRI BLOK C/3	Kota Padang	Amerika Serikat	10,70
106	PT. TANJUNG BOBLO MENTAWAI	PULAU AWERA	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	10,30
107	PT. PLAYGROUND VILLA RESIDENCE	JALAN KAMPUNG TERANDAM NO 60	Kota Padang	Spanyol	10,17
108	PT. MENTAWAI PEIPEI SURF CAMP	Jl. Kampung Tarandam No. 60	Kota Padang	Rusia	10,03
109	PT. RENTOKIL INDONESIA	SOUTH QUARTER TOWER B, LT.21 UNIT E, F, G & H JL.RA.KARTINI KAV.8	Kota Padang	Inggris	9,16
110	PT. SAINT JOHN TRAVEL	Jl. Kampung Tarandam no.60	Kota Padang	Amerika Serikat	8,63
111	PT. INDAH TANAH IMPIAN	DESA BOSUA, SIPORA SELATAN	Kabupaten Kepulauan	Namibia	8,00
112	PT. SURF DELIGHTS INTERNATIONAL	JALAN KAMPUNG TERANDAM NO. 60	Kabupaten Kepulauan	Brasil	7,70
113	PT. DEMPO SEIBA HILL	JL. IRIAN NO.01	Kota Padang	R.R. Tiongkok	7,53
114	PT. GOOD TIMES INDONESIA	Jalan Kampung Tarandam Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Australia	7,10
115	PT. BINTANG SAMUDERA MENTAWAI	Jalan Kampung Terandam No. 60	Kota Padang	Australia	7,00
116	PT. MAKI TOUR AND CRUISE	KOMPLEK POLAMAS BLOK I K.32	Kota Padang	Brasil	7,00
117	PT. OMBAK KABAU SURF CHARTER	Jalan Kampung Tarandam nomor 60	Kota Padang	Afrika Selatan	6,93
118	PT. LAS FLORES NARANGAS	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Perancis	6,70
119	PT. RUDI UZAN INVESTMENTS	KOMPLEK POLAMAS BLOK I K.32	Kota Padang	Australia	6,70
120	PT. SARANA INVESEMENT INDONESIA	JL. MANGGA XIII NO. 560	Kabupaten Kepulauan	Amerika Serikat	6,70
121	PT. SUNSET SURFING VILLAS	PULAU SIMAKAKANG	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	6,66
122	PT. ANAK GAGAK OMBAK	Pulau Awera	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	6,53

123	PT. MENTAWAI BERSAMA INVESTMENT	Jl. Raya KM 1	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	6,40
124	PT. PLAN BEE INVESTMENTS	PULAU AWERA	Kabupaten Kepulauan	Swedia	6,40
125	PT. THE POINT SURFHOUSE	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	6,40
126	PT. LABELLE PLAY GROUNDS	Pulau Masokut	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	6,33
127	PT. PAGAI RESORT MENTAWAI	DESA MALAKOPA	Kabupaten Kepulauan	Panama	6,00
128	PT. PRATHITA TITIANNUSANTARA	JL.BUNGUR BESAR RAYA No.: 34 H	Kabupaten Padang Pariaman	Turki	5,88
129	PT. ISLAND BOYS WORLDWIDE	Jalan Kampung Tarandam nomor 60	Kota Padang	Amerika Serikat	5,70
130	PT. AFRAME ISLAND INVESTMENT	Jalan Kamp Terandam, Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Amerika Serikat	5,63
131	PT. BETO LEO RUBEN DANILO PROPERTY	Jalan Kampung Terandam, Nomor 60	Kota Padang	Brasil	5,60
132	PT. DOM PIZZA INDONESIA	GEDUNG SAHID SUDIRMAN CENTER LT 27 JL. JEND.SUDIRMAN KAV.86,	Kabupaten Agam	Singapura	5,40
133	PT. HTS MENTAWAI INVESTMENT	Jalan Kamp Terandam, Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	5,33
134	PT. ALEGRIA KATJET SURF	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Brasil	5,30
135	PT. LOSMEN OMBAK INVESTMENT	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	5,30
136	PT. SEVEN PALMS RESORT	Desa Tuapejat	Kabupaten Kepulauan	Australia	5,30
137	PT. TIRTA BATANG MASANG	GEDUNG GRAHA BIP LANTAI 3, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAVELING 23	Kabupaten Agam	Samoa Barat	5,21
138	PT. MENTAWAI ISLAND INVESTMENT	Komplek Polamas 32, Padang	Kota Padang	Amerika Serikat	5,00
139	PT. PLAYGROUND SURF RESORT	PEGU, DESA TAILELEU, KEC. SIBERUT BARAT DAYA	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	5,00
140	PT. SURF ALL DAY	KOMPLEK POLAMAS BLOK I K. 32	Kota Padang	Amerika Serikat	5,00
141	PT. EASY TRACK SYSTEM	Jalan kampung tarandam nomor 60	Kota Padang	Amerika Serikat	4,70
142	PT. PADANG MATERIAL DELIVERY	Jalan Kampung Tarandam No. 60	Kota Padang	India	4,70
143	PT. SIFURA PROPERTY INVESTMENTS	Lances Left	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	4,04
144	PT. BUNGUS LAUT BIRU	JL. BYPASS KM 7 NO. 61	Kota Padang	Australia	4,00
145	PT. MENTAWAI DEVELOPMENT PROPERTY	Jl. Kampung Tarandam No.60	Kota Padang	Amerika Serikat	3,90
146	PT. GO-JEK INDONESIA	Jl. Kemang Timur No. 21	Kota Padang	Kepulauan Cayman	3,80
147	PT. INDONESIA INVESTMENT GROUP	Jalan Bikini 1 Denpasar	Kota Padang	Rusia	3,79
148	PT. BUSSINES SOLUTION SERVICES	KOMPLEK POLAMAS BLOK 32	Kota Padang	Amerika Serikat	3,70
149	PT. MENTAWAI SAPOU SIMAERUK	DUSUN PEIGU	Kabupaten Kepulauan	Australia	3,70
150	PT. RESORT MANAGEMENT GROUP	Jalan Kamp. Tarandam No. 60	Kota Padang	Amerika Serikat	3,70
151	PT. OLAS NAVIGATOR	Jl. Tekukur No. 1 RT.002 RW.002	Kota Padang	Italia	3,51
152	PT. ISLAND BUNGALOWS MACARONIS	Silabu	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	3,30
153	PT. ISLAND MANAGEMENT CONSULTANT	Jalan Bikini NO.01	Kota Padang	Amerika Serikat	3,30
154	PT. OMBAK MENTAWAI GADANG	SEBERANG PADANG SELATAN II NOMOR 22 A	Kota Padang	Afrika Selatan	3,30
155	PT. MERAPI UTAMA PHARMA	JL. CILOSARI NO.23	Kota Padang	Jepang	3,10
156	PT. KING MILLENIUM SURFCHARTERS	JALAN DIPONEGORO A 7 NOMOR 17- PADANG	Kota Padang	Spanyol	3,03
157	PT. FAVELA MENTAWAI CAMP	Komp. Polamas Blok K 32	Kabupaten Kepulauan	Australia	2,70
158	PT. PARADISE ISLAND DEVELOPMENT	Jalan Kampung Terandam Nomor 60	Kota Padang	Jerman	2,70
159	PT. AFRAMES PARADISE DEVELOPMENT	Jalan Kamp Terandam, Nomor 60	Kota Padang	Amerika Serikat	2,60
160	PT. MENTAWAI VILLA INVESTMENT	Jalan Kamp Terandam, Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	2,60
161	PT. SATORI UMA DEVELOPMENTS	JALAN KAMPUNG TERANDAM, NOMOR 60	Kota Padang	Uruguay	2,60
162	PT. NUSANTARA LAUTAN BIRU PASIFIK	Jl. Tanah Beroyo No. 17	Kota Padang	Amerika Serikat	2,50
163	PT. MELU'DA KOBRA MENTAWAI	DUSUN MENGALUNG	Kabupaten Kepulauan	Australia	2,40
164	PT. SUMATRA RESOURCES INTERNATIONAL	Jorong Banjar Rumah Nagari Pangkalan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Singapura	2,15
165	PT. NIPSEA PAINT AND CHEMICALS	JLANCOL BARAT I/A5/C NOMOR 10	Kota Bukittinggi	Hongkong, ERT	2,14
166	PT. AWERA ISLAND VILLAS	VILLA TALA, PANTAI JATI	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	2,00
167	PT. MENTAWAI INVESTMENTS INDONESIA	Jl. Kampung Terandam No. 60	Kota Padang	Amerika Serikat	2,00
168	PT. TWIN FLAME NUMBER	Jalan Kampung Tarandam Nomor 60	Kabupaten Kepulauan	Brasil	2,00
169	PT. INDONESIA SEA EXPEDITION ADVENTURE	Jl. Kampung Telong Kel. Seberang Padinggam Kec. Padang Selatan Kota Padang Prov. Sumatera Barat	Kota Padang	Swiss	1,67
170	PT. SAUDARA SELANCAR SENTOSA	Jalan Tanah Broyo 17	Kota Padang	Australia	1,40
171	PT. JALUMA LEISURE INVESTMENTS	Lances Kiri	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	1,30

172	PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	Gedung Perkantoran Landmark Fluit Blok B No.1 Lantai 7, Jl. Fluit Selatan Raya, Fluit, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta	Kota Padang	Hongkong, RRT	1,23
173	PT. DREAM BEACH KONTRAKTOR	Komplek Polamas Blok I K.32	Kabupaten Kepulauan	Australia	1,00
174	PT. MENTAS SOCIETY JMS	JALAN KAMPUNG TARANDAM NO.60	Kabupaten Kepulauan	Italia	1,00
175	PT. PEGASUS RESORT MANAGEMENT INDONESIA	Jl. Komplek Polamas I Blok K. 32	Kota Padang	Amerika Serikat	1,00
176	PT. RUMAH TROPIS LASCOTTI	JALAN KAMPUNG TARANDAM NO.60 PADANG	Kota Padang	Spanyol	1,00
177	PT. INDO TRADING COMMODITY	Jl. Kp. Terendam No. 60	Kota Padang	Amerika Serikat	0,80
178	PT. JAYA HEALTHY FOOD	JALAN LINGKAR SELATAN NO. 7	Kabupaten Dharmasraya	R.R. Tiongkok	0,63
179	PT. DEMPO TUYANG AQUATIC	JALAN SUMBA 1119 Wisma Indah, Kelurahan Ulak Karang Utara	Kota Padang	R.R. Tiongkok	0,33
180	PT. SUMATRA CHARITERS	JL PULAU KARAM NO. 84 B	Kota Padang	Australia	0,20
181	PT. INTAN BORNEO INTERNATIONAL	PERWATA TOWER LT.5 SUITE B, JL. FLUIT SELATAN RAYA KAV.1	Kabupaten Solok	R.R. Tiongkok	0,10
182	PT. PUNAKAWAN SUMATERA INTERNASIONAL	PERWATA TOWER LT.5 SUITE B, JL. FLUIT SELATAN RAYA KAV.1	Kabupaten Solok	R.R. Tiongkok	0,10
183	PT. TELOS ISLAND ADVENTURE	JL. TEPI PASANG DALAM NO.18 A	Kota Padang	Australia	0,10
184	PT. AGRI SUMBA MAS	WISMA 46-KOTA BNI SUITE 34.12, LT. 34, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 1	Kota Padang	Singapura	-
185	PT. ANDALAS ANAIPERMAI INTERNATIONAL	Korong Kandang Ampek	Kabupaten Padang Pariaman	R.R. Tiongkok	-
186	PT. ANUGRAH PHARMINDO LESTARI	JL. BOULEVARD BGR NO. 1	Kota Padang	Singapura	-
187	PT. ARTIC INDO PROJECT	Jalan Bedugul No. 35	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	-
188	PT. AWERA MANA ISLAND	JL. RAYA TUAPEJAT NO. 12, DESA TUAPEJAT	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	-
189	PT. BAIRD WEYER INTERNATIONAL	JALAN ANGGREK NOMOR 14	Kabupaten Kepulauan	Amerika Serikat	-
190	PT. BALI HANGAT HATI	JALAN RAYA ANYAR GANG III No. 2	Kabupaten Kepulauan	Brasil	-
191	PT. BANG BANG GORENG	Jl. Pantai Balangan No. 9	Kabupaten Kepulauan	Australia	-
192	PT. BARRENJOEY INDONESIA	Komp. Cendana Jala Mitra A, No. 8, RT. 004/RW. VI, Kel. Mata Air, Kec. Padang Selatan	Kota Padang	Australia	-
193	PT. BAZCORP CITRA INDONESIA	JL. RAYA RAWABUNTU BUARAN, RT.03, RW.01 - SERPONG	Kota Padang	Australia	-
194	PT. BUMI BERKAH BOGA	Menara Sentra, Lantai 15 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A	Kota Padang	Singapura	-
195	PT. COCA-COLA BOTTLING INDONESIA	South Quarter Tower C, Lantai 22, Jl. R.A. Kartini, Kav. 8	Kabupaten Padang Pariaman	Luxembourg	-
196	PT. COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA	South Quarter Tower C, Lantai 22, Jalan. R. A. Kartini, Kav. 8	Kabupaten Padang Pariaman	Inggris	-
197	PT. DDFVS GLOBAL INVESTMENTS	Kilometer 2	Kabupaten Kepulauan	Spanyol	-
198	PT. DEMPO SUMBER ENERGI	JALAN SUMATERA BLOK B NOMOR 1	Kabupaten Pesisir Selatan	Hongkong, RRT	-
199	PT. ELITE AGRO AND SPICES INTERNATIONAL	JALAN BY PASS KM 23 SIMPANG EMPAT ANAK AIR	Kota Padang	India	-
200	PT. FORE KOPI INDONESIA	Kompleks Kebayoran Centre A6-A7, Jl. Kebayoran Baru	Kota Padang	Singapura	-
201	PT. G4S SECURITY SERVICES	Metropolitan Tower 8th Floor Jl. RA.Kartini, TB Simatupang Kav. 14	Kabupaten Solok	Belanda	-
202	PT. GALEK INVESTMENT STRATEGIES	Jalan Raya Tuapejat, Kilometer 4	Kabupaten Kepulauan	Polandia	-
203	PT. GAMINDRA MITRA KESUMA	Menara Sudirman Kav 60 Lt 23	Kabupaten Pasaman Barat	Kepulauan Virgin Inggris	-
204	PT. INDACO WARNA DUNIA	JL. Raya Solo Stagen km 13,2	Kota Padang	Hongkong, RRT	-
205	PT. INDOMOBIL BUSSAN TRUCKING	Indomobil Tower Lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav. 11	Kota Padang	Jepang	-
206	PT. INTERNUSA BAHAGIA	Tanjung Sinjai	Kabupaten Kepulauan	Australia	-
207	PT. ISLAND STYLE GROUP	Jalan Nakula, Banjar Munduk Anggrek Raja	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rusia	-
208	PT. ISS INDONESIA	Graha ISS, Jl. Jend. Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya, Kel. Pondok Pucung, Rec. Pondok Aren	Kota Padang	Denmark	-
209	PT. JAYA SPICES EXIM	Jalan By Pass Km 22 RT. 03 RW. 05	Kota Padang	Uni Emirat Arab	-
210	PT. KEMAKMURAN SERTA KELIMPAHAN	JALAN GRIYA ALAM PECATU CLUSTER YUDISTIRA NOMOR 32	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	-

211	PT. LAUT MENARI	Jalan Raya Seminyak Gang Anyelir Nomor 6	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	
212	PT. MARITIME NETWORK INDONESIA	Jl. LITDA SUJONO IV NO. 22	Kota Padang	Malaysia	
213	PT. MATAHARI PANTAI PROPERTI	Dusun Mengalung	Kabupaten Kepulauan	Austria	
214	PT. MAVADO PROPERTY INTERNATIONAL	Jalan Mertanadi, Gang Limanani	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Italia	
215	PT. MEDAN BIOENERGY NUSANTARA	JALAN ABDULLAH LUBIS NOMOR 48/73	Kota Padang	Singapura	
216	PT. MEGA ENERGI KARYATAMA	JALAN BUKIT GADING RAYA BLOK E KAVLING NO 8 KELAPA GADING BARAT	Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	
217	PT. MEGA JAYA NET	JALAN UTAN JATI 7 B NO. 1-2, KOMPLEK RUKO DAAN MOGOT BARU	Kota Padang	Singapura	
218	PT. MENTAWAI BEACH VILLAS	BOSUA	Kabupaten Kepulauan	Afrika Selatan	
219	PT. MENTAWAI BLUE	Jalan Batang Arau 26	Kota Padang	Australia	
220	PT. OCTO BALI GROUP	JALAN OCTO	Kabupaten Kepulauan	Austria	
221	PT. OPTIMA TIRTA ENERGY	GD. MENARA RAJAWALI LT. 7-1, JL. DR. IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT#5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN	Kabupaten Pasaman Barat	Singapura	
222	PT. PARADISE BEACH MENTAWAI	Desa Mongan Bosua	Kabupaten Kepulauan	Australia	
223	PT. PATRIC INDY VENTURES	Jl. Sunset Road Nomor 89, Pertokoan Sunset Indah Kavling 3 Nomor 3B	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Perancis	
224	PT. PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL	BELLEZZA OFFICE TOWER LANTAI 7, JL. LETJEN SOEPENO NO.34 ARTERI PERMATA HIJAU	Kota Padang	Singapura	
225	PT. RAJDULAR BROTHERS	JALAN GARUDA MUARO KASANG DALAM, KORONG SUNGAI PINANG	Kabupaten Padang Pariaman	India	
226	PT. RIDHI AMMA AGRO	Jl Pemancungan No.5	Kota Padang	India	
227	PT. SAMA SAMA SEAPLANES	Jalan Anggrek Nomor : 6	Kota Padang	Afrika Selatan	
228	PT. SAMUDRA INDAH HIBALA	Jl. Batang Arau No.26	Kota Padang	Brasil	
229	PT. SANTAI SUASANA PROPERTI	JALAN DARMAWANGSA GANG CERIDA No. 57	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Afrika Selatan	
230	PT. SAUDARA SAMUDERA SENTOSA	JALAN BATANG HARAU NOMOR 66, PADANG	Kota Padang	Australia	
231	PT. SOLOK MEGAH PERKASA	Pantai Indah Utara II, Ruko Galeri Niaga Mediterania 1 B 8J	Kabupaten Solok Selatan	R.R. Tiongkok	
232	PT. SRI JANYA AGRO	DESA NAGARI KASANG	Kabupaten Lima Puluh Kota	Singapura	
233	PT. SURGA PANTAI KATIE	DUSUN KATIE	Kabupaten Kepulauan	Brasil	
234	PT. SURVEYOR INDONESIA	Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36	Kota Padang	Swiss	
235	PT. SWATI COMMODITIES	JL. BY PASS KM 20. TANJUNG AUR.	Kota Padang	India	
236	PT. TELUK BAYUR BULK TERMINAL	Jl. Banjarmasin No. 6-8	Kota Padang	Singapura	
237	PT. THE OTHER PROJECT	KILOMETER 4	Kabupaten Kepulauan	Italia	
238	PT. THEA UNIVERSAL TRADE	PERGUDANGAN SURI MULYA BLOK EE NO 7A JL. MARGOMULYO NO 44	Kota Padang	Singapura	
239	PT. TRUE FRIENDS MENTAWAI	Dusun Katiet	Kabupaten Kepulauan	Brasil	
240	PT. WILMAR NABATI INDONESIA	B&G Tower Lt. 9 Jl. Putri Hijau No. 10	Kota Padang	Singapura	
TOTAL					121.538,48

Padang, Januari 2025

KEPALA


ADIB ALFIRI, SE, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730413 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Setia Budi No.15, Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342

<http://disperindag.pemprovsumbar.go.id>

PADANG

RINCIAN PENINGKATAN INVESTASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT
INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

No	Nama Perusahaan	Alamat	Nilai Investasi (Rp. Juta)
1	2	3	4
1	PT. ACE HARDWARE INDONESIA	Kota Padang	455,80
2	PT. ELJHON PUTRA SINGGALANG	Kabupaten Agam	65.632,00
3	PT. ABADI PADANG PANJANG	Jln. Profesor Doktor Hamka Nomor 69	375,00
4	PT. ABDI KARYA BINA PRATAMA	Kota Padang	-
5	PT. ABIPRAYA NUSANTARA ENERGI	Jl Di Panjaitan Kav. 14	35,00
6	PT. ABRO PRIMA MAKMUR	Kota Pariaman	780,00
7	PT. ACEH MINERAL PRIMA	JL ADINEGORO, KOMPLEK GRIYA ALTARINDO NO 31 A	4.032,00
8	PT. ADI ARMADA JAYA	GD GRAHA KIRANA LT 6, JL YOS SUDARSO KAV 88, SUNTER JAYA, TJ PRIOK	100,00
9	PT. ADI SARANA ARMADA	Kota Padang	1.245,40
10	PT. ADRIKNI HAKIKI BERKAH	Kota Padang	403,00
11	PJ. ADVANTAGE SCM	Kota Padang	3.929,60
12	PT. AGRA JAYA UTAMA	Muara Baru Centre (MBC) Blok B Lantai I Nomor 110, Pelabuhan Nizam Zachman	475,00
13	PT. AGRIMITRA UTAMA PERSADA	Jorong Sipatai Nagari Taram Kecamatan Harau	628,69
14	PT. AGRINUSA JAYA SANTOSA	Kota Padang	3,60
15	PT. AGRO BISNIS SUMBER MAKMUR	Kabupaten Pasaman Barat	-
16	AGRO WIRA LIGATSA	Kabupaten Pasaman Barat	8.736,90
17	PT. AGUNG ABADI PUTRA MANDIRI	Jorong Sipatai Nagari Taram Kecamatan Harau	63.054,16
18	PT. AHRU GEMILANG SEJAHTERA	Kota Padang	50,00
19	PT. AIDA RATTAN INDUSTRY	Kota Padang	0,60
20	PT. AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR	Kabupaten Tanah Datar	23.335,60
21	PT. AIR PUTIH BINA MANDIRI	Kabupaten Lima Puluh Kota	116,00
22	PT. AKUAMAN HYDRO PRADANA	Kabupaten Sijunjung	-
23	PT. ALFA KARYA ABADI	Kota Padang	551,50
24	CV. AL-FAZZA RAYA	Kota Padang	-
25	CV. ALIFINDO PERKASA	Kota Padang	20,00
26	PT. ALLIED INDO COALJAYA	RUKO BSD DE LATINOS CLUSTER VIRGIN ISLAND BLOK NA. 14	97.090,47
27	PT. AMANAH INSANILLAHIA	BATUSANGKAR, KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT	1.408,50
28	PT. AMPALU INDAH LESTARI	Kota Padang	20,00
29	PT. ANAM KOTO	GEDUNG SONA TOPAS TOWER LT. 5A JL. JEND. SUDIRMAN KAV.26	41.906,03
30	PT. ANANDA NAILI PRIMA	Jl. Belakang Olo No. 28	16.500,00
31	PT. ANATHAMA KONSTRUKSI UTAMA	Kabupaten Pasaman	20,00
32	PT. ANDALAN MITRA PRESTASI	Kota Padang	-
33	PT. ANDALAS MUARA SEJAHTERA	Jl. Jakarta F/03/10	2.280,00
34	PT. ANDALAS TERANG CRUSHINDO	JALAN NEGARA PADANG - PEKANBARU KM.200 JORONG PASAR BUYUH KABARI TANJUNG PAUH	43,50
35	PT. ANGKASA PURA KARGO	Jl. Desa Pasar VI KUalaamu, Kec. Beringin	399.785,00
36	PT. ANOM	Kota Padang	-

37	PT.	ANSAR TERANG CRUSHINDO	Kabupaten Lima Puluh Kota	480,25
38	PT.	ANTARMITRA SEMBADA	JALAN POS PENGUMBEN RAYA NO.8, RT.005/005, SUKABUMI SELATAN, KEBUN JERUK	64,60
39	PT.	ANUGERAH WAHYUDI SEJAHTERA	JL. AHMAD KARIM NO.10	100,00
40	PT.	ANUGRAH ARGON MEDICA	Titan Center Lantai 4, Jl. Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No. 5, Bintaro Jaya Sektor 7	32,93
41		ANUGRAH BANGUN KARTO	Jalan Lintas Sumatra Km.7 NO.113 Sikabau	237,40
42	PT.	ANUGRAH BUMINDO RESOURCES	Kota Padang	-
43	PT.	ANUGRAH HALABAN SEPAKAT	Kabupaten Lima Puluh Kota	12.670,80
44	CV.	ARJAYA KAHARSA	Kota Padang	3.595,00
45	PT.	AROSUKA MANDIRI	Kabupaten Solok	-
46	PT.	ARTAMA SENTOSA INDONESIA	Kota Padang	-
47	PT.	ARUPADHATU ADISESANTI		7.747,93
48	PT.	ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK (PELABUHAN MERAK)		879,60
49	PT.	ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK (PELABUHAN MERAK)	Kota Padang	278,60
50	PT.	ASM KONSTRUKSI	Kota Padang	-
51	PT.	ASTRA INTERNATIONAL	MENARA ASTRA, LANTAI 58, 59, 60, 61, 62, 63, JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 5-6	704,48
52	PT.	ATHAYA PUTRA MANDIRI	Kota Padang	7,00
53	PT.	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	JALAN RAYA SUMBAR RIAU, JORONG SOPANG	2.523,05
54	PT.	AURA MANDIRI SEJAHTERA	Kabupaten Pasaman	425,00
55	PT.	AXEL JAYA KONSTRUKSI	JL. SYAMSIAR THAIB No.8	371,00
56	PT.	BAJRADIKA RANGKIAN ENERGI	Gedung YPK-PLN, Jl. Lebak Bulus Tengah No. 5	300,00
57	PT.	BAKAPINDO	Jorong Durian	2.000,00
58	PT.	BAKRJE PASAMAN PLANTATIONS	NAGARI SUNGAI AUA	574.699,90
59	PT.	BAKTI TIMAH SOLUSI MEDIKA		-
60	CV.	BARA MITRA KENCANA	Tanah Kuning	2.374,64
61	PT.	BATANGHARI BARISAN	Kota Padang	-
62	PT.	BATUBARODA INTERNASIONAL	JALAN PROF.DR. HAMKA, NOMOR 17 B TABING	160,00
63	PT.	BAYANG NYALO HIDRO	RUKO DHARMAWANGSA VI. JL. DHARMAWANGSA NO.39	61.951,82
64	PT.	BELIWONG SERATUS EMPAT PULUH EMPAT	Jorong Ronah Pembangunan	3,00
65	PT.	BENINGS PRATAMA GRUP	Jln. Lingkar Luar Barat Komplek Golf Lake Residence Rukan Venice B No. 58	500,00
66		BERDIKARI PONDASI PERKASA	JL.Bandengan Utara No. 31B	402,00
67		BERKAH ALAM DHARMASRAYA	Kabupaten Dharmasraya	-
68		BERKAH ENERGI PRATAMA	Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh Km 8 dan 9	-
69		BERKAH KIMBA NUSANTARA	Kabupaten Kepulauan Mentawai	25,00
70		BERKAT TAMAR	Kota Pariaman	396,60
71		BERKAT USAHA MAMIPATI	Kabupaten Solok	-
72	PT.	BERSAMA DAUKY MULYA	KP. HARIKUKUN RT.003 RW.007	61,29
73	PT.	BERSAMA NAGARI BUDIMAN	Jln. Pemuda Nomor 23 G	193,50
74	PT.	BERSAMA ZATTA MULYA	KP. HARIKUKUN (KOMPLEK INDUSTRI PRAPANCA) RT.003 RW.006	18,07
75	PT.	BGR LOGISTIK INDONESIA	JL. KALI BESAR TIMUR NOMOR 5-6	23.609,23
76	PT.	BINA SAN PRIMA		-
77	PT.	BINAPRATAMA SAKATOJAYA		3,00
78	PT.	BINTANG ANUGERAH SEMESTA		1.251,00
79	CV.	BINTANG PATIMAH MANDIRI	Kabupaten Pasaman	642,00
80	CV.	BINTANG SUMATRA PACIFIC	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.150,00
81	PT.	BINTARA TANI NUSANTARA	Kabupaten Pasaman Barat	5.134,40
82	PT.	BIOMASS ANDALAN ENERGI	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.691,40
83	PT.	BIROTIKA SEMESTA	Kota Padang	-

84	PT.	BLUE BIRD		174,60
85	PT.	BLUEBONNET CITRA ABADI	Kota Padang	269,40
86	CV.	BOGA UTAMA	Kota Padang	25,30
87	PT.	BRANTAS TOTAL ENERGI	Kabupaten Dharmasraya	31.500,00
88	PT.	BRATACO	Kota Padang	-
89	PT.	BRINGIN GIGANTARA	Kota Padang	126,85
90	PT.	BUKIT ASAM	Kota Sawah Lunto	80.809,75
91	PT.	BUKIT MULTI PROPERTI	Kota Sawah Lunto	69,40
92	PT.	BUKIT RAYA MUDISA		159.669,00
93	PT.	BUKITTINGGI MANDIRI SEJAHTERA		11.296,10
94	PT.	BUMI DAYA PLAZA		6,40
95	PT.	BUNDA EMPAT PILAR	Kota Padang	1.106,30
96	PT.	BUNDA MINANG CITRA	Kota Padang	4.300,80
97	PT.	CAHAYA AGAM LESTARI		-
98	PT.	CAHAYA BUKIT NUGRAHA		8.800,00
99	PT.	CAHAYA BUMI PERDANA	Kota Sawah Lunto	187,60
100	PT.	CAHAYA GEMILANG RAFLESIA	Kabupaten Dharmasraya	-
101	PT.	CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI	Kota Padang	43,10
102	PT.	CAHAYA OLO MAS	Kota Padang	-
103	PT.	CAKRA SATYA INTERNUSA	Kota Padang	75,00
104	PT.	CAPELLA MEDAN	Kota Padang	38,30
105	PT.	CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK	Kabupaten Agam	1.659,90
106	PT.	CENDANA SEMBILAN	Kota Padang	-
107	PT.	CENTRAMAS SARANA SUKSES	Kabupaten Solok Selatan	-
108	PT.	CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	Kabupaten Padang Pariaman	139.977,90
109	PT.	CENTRATAMA MENARA INDONESIA	Kabupaten Pasaman Barat	10,50
110	PT.	CIOMAS ADISATWA	Kabupaten Padang Pariaman	2.200,00
111	PT.	CIPTA BATU LIMAPULUH KOTA	Kabupaten Lima Puluh Kota	-
112	PT.	CIPTA NIAGA SEMESTA	Kabupaten Agam	291,00
113	PT.	CIPTA BATU LIMAPULUH KOTA	Kabupaten Lima Puluh Kota	-
114	PT.	CIPTA MAPAN LOGISTIK	Kabupaten Tanah Datar	-
115	PT.	CITALARAS CIPTA INDONESIA	Kabupaten Pesisir Selatan	1.800,00
116	PT.	CITRAMUDA NOER BERSAUDARA	Kabupaten Pesisir Selatan	2.900,00
117	PT.	COBRA DENTAL INDONESIA	Kota Padang	22,20
118	PT.	CONTINDO RAYA	Kota Padang	-
119	PT.	CSM CORPORATAMA	Kota Padang	-
120	CV.	CV. KALUMFANG	Kota Solok	60,00
121	CV.	CV. TJAHAJA BARU	Kabupaten Dharmasraya	94,40
122	PT.	DALMA CITRA PRIMA	Kota Padang	776,30
123	PT.	DAMASRAYA SAWIT LESTARI	Kabupaten Dharmasraya	9.438,80
124	PT.	DAPINDO PRATAMA	Kota Padang	141,00
125		DAS BROTHERS	Kabupaten Agam	-
126	PT.	DAS UTAMA	Kabupaten Agam	131.265,20
127	PT.	DASA TRANS NUSANTARA	Kota Padang	250,00
128	PT.	DASRAT SARANA ARANGSEJATI	Kota Sawah Lunto	479,50
129	PT.	DAYA ANUGRAH MANDIRI	Kabupaten Lima Puluh Kota	93,55
130		DAYA INDAH YASA	Kabupaten Dharmasraya	306,47
131	PT.	DAYA MITRA SERASI	Kota Padang	-
132	PT.	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Kabupaten Agam	14.225,60
133	PT.	DEKKY KARYA BESTARI	Kabupaten Pesisir Selatan	4.800,00
134	PT.	DELVI PRIMATAMA	Kota Padang	-
135	PT.	DEMPO BANGUN MITRA	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.974,30
136	PT.	DEMPO MAJU CEMERLANG	Kabupaten Pesisir Selatan	-

137	PT. DESKO	Kabupaten Pasaman	89,95
138	PT. DETIK TIVI SEMBILAN	Kota Padang	-
139	PT. DHARMA BANDAR MANDALA	Kabupaten Padang Pariaman	7.916,00
140	PT. DHARMA POWER BERSAMA	Kabupaten Solok	-
141	PT. DHARMASRAYA KILAU ABADI	Kabupaten Dharmasraya	93,70
142	PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA	Kota Padang	24,20
143	PT. DIPO INTERNASIONAL PAHALA OTOMOTIF	Kabupaten Pasaman Barat	17.549,17
144	PT. DOS-NI-ROHA	Kota Padang	-
145	DUO BERLIAN NUSANTARA	Kabupaten Dharmasraya	-
146	PT. EKA BOGAINTI	Kota Bukittinggi	397,90
147	PT. EKA MAS REPUBLIK	Kota Padang	-
148	PT. EKAWEN CIPTA UTAMA	Kota Padang	-
149	PT. ELECTRONIC CITY INDONESIA TBK	Kota Padang	415,20
150	PT. ELIZABETH HANJAYA	Kota Padang	23,80
151	PT. ELNUSA PETROFIN	Kota Padang	-
152	PT. ENERGI MEGA MANDIRI	Kabupaten Pesisir Selatan	-
153	PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING	Kota Padang	197,80
154	PT. ERHA CLINIC INDONESIA	Kota Padang	-
155	PT. EVERBRIGHT	Kabupaten Agam	-
156	FAJAR WISATA LANGGENG	Kabupaten Padang Pariaman	-
157	PT. FAMILI RAYA	Kota Padang	-
158	PT. FAST FOOD INDONESIA Tbk.	Kota Padang	2.344,80
159	CV. FAZILLA	Kota Pariaman	48,00
160	CV. FIFY	Kota Padang	281,40
161	PT. FIF MEDIKA	Kota Padang	28.623,20
162	PT. FIKBER BANGUN PERSADA	Kabupaten Dharmasraya	800,00
163	CV. FM	Kabupaten Pasaman	225,00
164	PT. FOODS BEVERAGES INDONESIA	Kota Padang	-
165	PT. G5 POWER	Kabupaten Lima Puluh Kota	70,00
166	PT. GADANG HIDRO ENERGI	Kabupaten Solok Selatan	40,00
167	PT. GANDA PUTERA INSAS	Kota Padang	44,60
168	PT. GARDA BHAKTI NUSANTARA	Kota Padang	0,50
169	PT. GAYA MAKMUR TRACTORS	Kota Padang	-
170	CV. GEMA JAYA ABADI	Kabupaten Padang Pariaman	1.100,00
171	PT. GIWAM GROUP CONSTRUKSINDO	Kota Bukittinggi	303,50
172	PT. GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA	Kota Padang	961,14
173	PT. GLOBAL JET EXPRESS	Kota Padang	1.360,10
174	PT. GO-JEK INDONESIA	Kota Padang	5,00
175	PT. GOTRANS LOGISTICS INTERNATIONAL	Kota Padang	-
176	PT. GRAHA AMANAH SELARAS	Kota Sawah Lunto	1.552,72
177	PT. GRAHA JAKARTA UTAMA	Kota Padang	275.068,40
178	PT. GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk	Kota Padang	2,90
179	PT. GRAHA SARANA DUTA	Kota Padang	-
180	PT. GRAND MALL MANDIRI	Kota Padang	686,34
181	PT. GRHA HUMANINDO MANAJEMEN	Kota Padang	-
182	PT. GRIYA CIPTA OPTIMAL	Kota Padang	91,73
183	PT. GUBAH LINGKUNGAN SERASI	Kabupaten Padang Pariaman	286,70
184	PT. GUGUK TINGGI	Kota Sawah Lunto	-
185	PT. GUNUNG MAS INTI SEJAHTERA	Kota Padang	487,49
186	CV. GUNUNG NAGO	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.587,30
187	PT. HALABAN BUMI MINERAL	Kabupaten Lima Puluh Kota	22,50
188	CV. HALABAN HIDRO ENERGI	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,40
189	PT. HAMPARAN KEMILAU INDAH	Kabupaten Dharmasraya	346,30

190	PT.	HASABA GLOBAL MATERINDO	Kabupaten Lima Puluh Kota	1.154,00
191	PT.	HAYATI PRATAMA MANDIRI	Kabupaten Pasaman	180,40
192	PT.	HEFIMA NIAGATAMA	Kabupaten Lima Puluh Kota	196,00
193	PT.	HENSAN ANDALAS PUTERA	Kabupaten Padang Pariaman	1.100,00
194	PT.	HEXINDO ADIPERKASA	Kota Padang	103,00
195	PT.	HIDAYAH INTI PRATAMA	Kabupaten Lima Puluh Kota	100,00
196	PT.	HIDRO POWER LUBUAK JANTAN	Kabupaten Tanah Datar	275,00
197		HOME CENTER INDONESIA RETAIL	Kota Padang	26,60
198	PT.	HOTEL GRAND ZURI	Kota Padang	19.849,00
199	PT.	HULLER MAMA GROUP	Kabupaten Dharmasraya	8.000,00
200	PT.	INANG SARI	Kabupaten Agam	2.704,50
201	PT.	INDO GRAHA CIPTA	Kabupaten Agam	2.881,00
202	PT.	INDOGAS MULTI PERKASA	Kabupaten Pesisir Selatan	1.926,50
203	PT.	INDOMARCO ADI PRIMA	Kota Bukittinggi	3.344,80
204	PT.	INSURINDO INTERSERVICES	Kota Padang	1.624,70
205		RONY CHRISTIAWAN SALAM	JL. AKASIA GOLF RAYA NO.6 BGM PIK	50,00
206		RIMBO PERADUAN	JL. SUDIRMAN NO. 20 A	330,00
207		SERIBU SEMBILANRATUS DELAPAN	JL. BATANG ARAU NO 32	6.880,00
208	PT.	SUMATERA KARYA AGRO	Jalan Siak 2, Komplek Pergudangan Siak 2, Ruko Nomor 14-15	14.000,00
209		USAHA KITA SENTOSA	Jalan Tan Malaka Km. 8, Simpang Kuranji	12.117,76
210		USAHA MINERAL LINGGA	JL. BOULEVARD KELAPA GADING RUKO THE KENSINGTON, TKC, A06	4.000,00
211	CV.	TJAHAJA BARU	JL. DAMAR NO. 58	33.436,44
212	CV.	TAHITI COAL	JALAN KHATIB SULAIMAN	536,45
213	PT.	TALENGGAK JAYA FARM	Jl. Moh Yamin km.5 nagari air tabit balai jaring Subaladuang	3.208,00
214	PT.	TANJUNG ALAM MEDIKA MANDIRI	PERUM SUMBAR MAS BLOK G/1	14.962,00
215	PT.	SUTAN ANAM ANAM TRANS	JL. JHONI ANWAR NO. 44	2,50
216	PT.	SUTAN KASIM	JL. VETERAN NO. 14	21,55
217		SWARNADWIJA JAYA PRATAMA	JALAN VETERAN NO. 11 C	65,00
218		SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI	JL. INDUSTRI RAYA III UJUNG BLOK AH/8	1.273,61
219	PT	USAHA GARDA ARTA	Wisma Staco Lt. 2Jl. Casablanca Raya Kav. 18	12,50
220	PT.	ZULIA MENTAWAI RIK	Kabupaten Padang Pariaman	150,00
221	CV.	ZANE	Kabupaten Lima Puluh Kota	390,70
222	PT.	YORIYUSAKIFA YUKI GROUP	Kabupaten Lima Puluh Kota	-
223	CV.	YESHA REZKI	PADANG KUBU	294,70
224	CV.	X DAREH	SUNGAI SANGKIR	-
225	PT.	WAHANA TIRTASARI	JL.SPRING TOWER, 04-45 KI. YOS SUDARSO	361,00
226	PT.	VIMA BUNGAMAS	Kota Padang	64.080,82
227	PT.	USAHAGUNA MITRAPERSADA	Kota Padang	117,50
228	PT.	UNIVERSAL SAMUDERA SUKSES	Kota Padang	175,50
229	PT.	UMEGA SEMBILAN BERLIAN	Kabupaten Dharmasraya	315,00
230	PT.	TUSHAKA ENERGI NUSANTARA	Kota Padang	19.532,90
231	PT.	TULAS SAKTIJAYA	KAPUNDUNG, JORONG VI KOTO SELATAN, NAGARI KINALI	2.412,17
232	PT.	TRUST CERTIFIED INTERNATIONAL	Perkantoran Grand Palace Kemayoran Blok A25, Jl. Benyamin Sueb Blok A5	22,55
233	PT.	TRIPA BARA	Kabupaten Pesisir Selatan	8.557,00
234	PT.	TRI SAPTA JAYA	Kota Padang	-
235	PT.	TRI FILIA ENERGY	Jorong Batang Tabik	1.019,80
236	PT.	TRANSCO PRATAMA	Kabupaten Dharmasraya	96.430,04
237	PT.	TRANSCO ENERGI UTAMA	Diponegoro nomor 7	23,05
238	PT.	TRANS RETAIL INDONESIA	Kota Padang	-

239	PT.	TRANS REKREASINDO	Kota Padang	-
240	PT.	TOKO BESI SUMBER BARU	Kota Padang	-
241	PT.	TJAHAJA BARU AGRI	Kota Padang	-
242	PT.	TJAHAJA BARU ABADI	Kota Padang	6,75
243	PT.	TIRTAKENCANA TATAWARNA	Kabupaten Lima Puluh Kota	1,21
244	PT.	TIRTA MEDICAL INDONESIA	Kota Padang	19,49
245	Perum	TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI	Kota Bukittinggi	750,70
246	PT.	TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR	Kota Padang	194.810,11
247	PT.	TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI	Kota Padang	17,73
248	PT.	TIDAR KERINCI AGUNG	Kabupaten Dharmasraya	29.802,33
249	PT.	TELAGA DEWI AGRI	Kabupaten Padang Pariaman	1,10
250	PT.	TAZAR SEJAHTERA MANDIRI	Kota Padang	0,70
251	PT.	TAZAR GUNA MANDIRI	Kota Padang	1,30
252	PT.	TATALOGAM LESTARI	Kota Padang	1,60
253	PT.	TARGET KELOLA SECURINDO	Kota Padang	1,70
254	PT.	TANJUNG ALAM MEDIKA MANDIRI	Kabupaten Agam	12.000,00
255	PT.	TALENGGAK JAYA FARM	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.200,00
256	CV.	TAHITI COAL	Kota Sawah Lunto	1,20
257	PT.	SWARNABUMI ILMAN PERSADA	Kabupaten Dharmasraya	400,00
258	PT.	SWADHARMA SARANA INFORMATIKA	Kota Padang	4.563,80
259	PT.	SURYA WIDJAJA INVESTAMA	Kota Padang	25,80
260	PT.	SURYA MADISTRINDO	Kota Bukittinggi	28,25
261	CV.	SURYA GEMILANG UTAMA	Kabupaten Pasaman	63.521,55
262	PT.	SURIATAMA MAHKOTA KENCANA	Kota Padang	2.200,00
263	PT.	SUPRACO MITRA ENERGIE	Kabupaten Solok	948,42
264	PT.	SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA	Kota Padang	18,10
265	CV.	SUNGAI LANDAI	Kota Pariaman	1.500,00
266	CV.	SUMUA NAN JANIAH	Kabupaten Sijunjung	249,60
267	PT.	SUMBER UTAMA MANDIRI ABADI	Kota Padang	2.174,86
268	PT.	SUMBER SAMUDRA SEJATI	Kota Padang	200,00
269	PT.	SUMBER NUANSA INTERCOM RAYA	Kota Padang	-
270	PT.	SUMBER ALAM RAYA WISESA	Kota Padang	-
271	PT.	SUMBAR ANDALAS SAWIT INDOJAYA	Kabupaten Sijunjung	208,00
272	PT.	SUMATRASARANA SEKARSAKTI	Kota Padang	5,20
273	PT.	SUMATERA SUMBER MINERAL	Kabupaten Tanah Datar	10.217,80
274	CV.	SULTAN FAJAR JAYA	Kota Solok	350,00
275	PT.	SUKSES JAYA WOOD	Kabupaten Pesisir Selatan	21.812,00
276	PT.	SUKANDA DJAYA	Kota Padang	-
277	PT.	SUKA FAJAR	Kota Padang	14.445,59
278	PT.	STATIKA MITRASARANA	Kabupaten Padang Pariaman	28.243,70
279	PT.	SORAYA BERJAYA INDONESIA	Kota Padang	250,00
280	PT.	SOLOK PREMIERE WISATA	Kota Solok	-
281	PT.	SMART TELECOM	Kabupaten Padang Pariaman	-
282	PT.	SITI HAWA	Kota Padang	3.348,31
283	PT.	SINERJI TENAGA AIR	Kabupaten Pesisir Selatan	102.107,30
284	PT.	SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA	Kota Padang	6.339,93
285	PT.	SIMPANG TUGU SEJATI	Kota Padang	1.425,07
286	PT.	SERASI AUTORAYA	Kota Padang	1.220,30
287	PT.	SEPAKAT KARYA MINERAL	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.000,00
288	PT.	SENTRAL TIETA JAYA	Kota Padang	237,25
289	PT.	SEMEN PADANG	Kota Padang	40.460,53
290	CV.	SELAYANG PANDANG	Kabupaten Solok	1,10
291	PT.	SELAGO MAKMUR PLANTATION	Kabupaten Dharmasraya	2.002,68

292	PT.	SAWITA PASAMAN JAYA	Kabupaten Pasaman Barat	354,60
293	PT.	SAWIT MAKMUR PERKASA	Kabupaten Sijunjung	89,95
294	PT.	SAUDARA SATU MARGA	Kota Padang	136,95
295	PT.	SATRIA PRIMA SHUBURY	Kabupaten Lima Puluh Kota	79,40
296	PT.	SARIMELATI KENCANA	Kota Bukittinggi	1.924,95
297	PT.	SARI COFFEE INDONESIA	Kabupaten Padang Pariaman	17.092,10
298	PT.	SARI BUAH SAWIT	Kabupaten Pasaman Barat	6.700,64
299	PT.	SARANA MITRA SAUDARA	Jalan Khatib Sulaiman No.88, Kelurahan Ulak Karang Selatan	17.592,21
300	PT.	SARANA MECHANICAL SERVICE	JALAN BY PASS KM 16	241,55
301	PT.	SARANA DEPO KENCANA	Gedung PT AVIA AVIAN Jalan Raya Surabaya-Sidoarjo KM 19	1.513,60
302	PT.	SAPTA SENTOSA JAYA ABADI	DESA LUBUK PINANG	4.355,31
303	PT.	SAPTA SARI TAMA	Kota Padang	63,02
304	PT.	SAMUDERA MURTI PERKASA	Kota Padang	646,70
305	PT.	SAHABAT JAYA SENTOSA	Kota Padang	4.939,00
306	CV.	SAGO JAYA	Jorong Pulau Barambai	190,00
307	PT.	SADEWA KARYA TAMA	Kabupaten Dharmasraya	13.782,99
308	PT.	RIZQULLAH MEDISKA INDONESIA SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	9,60
309	PT.	RINKAS SUKA UTAMA	Kota Padang	30,82
310	CV.	RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR	Kabupaten Pasaman Barat	9,60
311	CV.	RH JAYA KONTRAKTOR	Kabupaten Pasaman	447,30
312	PT.	RESTU IBU MEDITAMA	Kota Padang	1.020,00
313	CV.	RESTU GRAHA ANEMER	Kabupaten Pasaman	500,00
314	PT.	RESKA MULTI USAHA	Kota Padang	40,76
315	PT.	REKSO NASIONAL FOOD	Kota Padang	322,00
316	PT.	REKA CIPTA KONSULINDO PRIMA	Kota Padang	798,00
317	PT.	REGINA CAHAYA INSANI	Kota Padang	5.660,52
318	PT.	RED PLANET INDONESIA, TBK	Kota Bukittinggi	9,60
319	PT.	RANGKAYO BASA	Kota Padang	57,83
320	PT.	RAMAYANA LESTARI SENTOSA	Kota Padang	60,76
321	CV.	RAMADSYAH	Kota Padang	73,10
322	PT.	RAJDULAR BROTHERS	Kabupaten Padang Pariaman	29.804,61
323	PT.	RAJAWALI NUSINDO	Kota Padang	13.156,70
324	PT.	RAHMA ERFANI NIZAR	Kabupaten Tanah Datar	5.000,00
325	PT.	RADJA POULTRY SHOP	Kabupaten Lima Puluh Kota	2.932,50
326	CV.	PUTRI SURYA PRATAMA NATURAL	Kota Sawah Lunto	350,00
327	PT.	PUTRA FIRGO LESTARI	Kabupaten Agam	961,09
328	Persero	PUSTAKA ANGGREK GROUP	Kota Padang	2,55
329	PT.	PRODIA WIDYAHUSADA	Kota Bukittinggi	5,00
330	PT.	PRAMITA	Kota Padang	131,50
331	PT.	POLARIS MITRA SEJATI	Kota Padang	51,10
332	PT.	PINNACLE RESORT MANAGEMENT	Kota Padang	27,56
333	PT.	PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL	Kabupaten Padang Pariaman	3.449.429,72
334	PT.	PESONA NATASHA GEMILANG	Kota Padang	119,20
335	PT.	PESONA INDONESIA MULIA	Kota Bukittinggi	788,28
336	PT.	PESONA BATANG ARAU	Kota Padang	5,40
337	PT.	PESISIR HIDRO ENERGI	Kabupaten Agam	429,00
338	PT.	PESISIR ENERGI NUSANTARA	Kabupaten Pesisir Selatan	15,00
339	PT.	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA	Kabupaten Padang Pariaman	1.109.925,23
340	PT.	PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA	Kota Padang	74.607,91
341	PT.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	Kabupaten Agam	138.091,54
342	PT.	PERTAMINA PATRA NIAGA	Kabupaten Padang Pariaman	4.474,60

343	PT.	PERSONEL ALIH DAYA	Kota Padang	44,00
344	PT.	PERSONA PRIMA UTAMA	Kota Padang	1.400,15
345	CV.	PERMATA HALABAN	Kabupaten Lima Puluah Kota	-
346	PT.	PERMATA BUNDA SOLOK	Kota Solok	5,20
347	PT.	PERKEBUNAN NUSANTARA IV	Kabupaten Pasaman Barat	3.623,80
348	PT.	PEMANFAATAN TENAGA AIR	Kabupaten Pesisir Selatan	1.350,20
349	PT.	PELABUHAN TANJUNG PRIOK	Kota Padang	5,00
350	PT.	PEIPEI MANDIRI	Kabupaten Kepulauan Mentawai	170,00
351	PT.	PEBANA ADI SARANA	Kabupaten Lima Puluah Kota	23.577,95
352	PT.	PASOKA SUMBER KARYA	Kota Padang	19.882,50
353	PT.	PASAMANMARAMA SEJAHTERA	Kabupaten Pasaman Barat	450,00
354	PT.	PASAMAN PRIMA KREASI	Kabupaten Pasaman	18.480,60
355	PT.	PASAGAM TENAGA PERKASA	Kota Padang	40,00
356	PT.	PARAMA GLOBAL INSPIRA	Kabupaten Agam	376,20
357	PT.	PANGERAN SITI HOTEL	Kota Padang	18.327,07
358	PT.	PANEN JAYA SENTOSA	Kota Padang	413,74
359	PT.	PANDORA ENERGI PERSADA	Kabupaten Padang Pariaman	1.590,00
360	PT.	PANCARAN SINAR MANDIRI	Kota Padang	226,95
361	PT.	PADANG MEDIA TELEVISI	Kota Padang	2.364,10
362	PT.	PADANG INDAH CITY	Kota Padang	200,00
363	PT.	PADANG DISTRIBUSINDO RAYA	Kabupaten Solok Selatan	1.150,38
364	PT.	KUNANGO JANTAN	Kabupaten Padang Pariaman	5.838,10
365	PT.	KUMBANG JANTAN NUSANTARA	Kota Padang	4,50
366	PT.	KRISTAL MINANG SEJATI	Kota Padang	7,60
367	PT.	KRIDA RAGAM INTEGRASI SOLUSI	Kota Padang	22,00
368	PT.	KOPI BINTANG INDONESIA	Kota Padang	700,00
369	CV.	KITA MULIA JAYA	Kota Padang	100,00
370	CV.	KITA MULIA JAYA	Kota Padang	127,50
371	PT.	KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	Kota Padang	740,00
372	PT.	KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA	Kota Padang	2.070,50
373	PT.	KIEN CAI INDONESIA	Kota Padang	966,60
374	PT.	KENCANA SAWITA SENTANA	Kabupaten Pesisir Selatan	4.441,90
375	PT.	KEMILAU PERMATA SAWIT	Kabupaten Pesisir Selatan	18.182,40
376	PT.	KARYA DELTAMAS ABADI	Kota Padang	928,70
377	CV.	KARYA AGUNG MEGAH UTAMA	Kabupaten Agam	34.610,40
378	CV.	KARUNIA MOTOR	Kabupaten Agam	9.951,00
379	PT.	KARUNIA BUKIT MAS	Kabupaten Lima Puluah Kota	241,50
380	PT.	KAPAL OMBAK SEMPURNA	Kota Padang	210,40
381	PT.	KAMARDI ISYE FAMILI	Kota Padang	776,50
382	PT.	KAKAK ADEK SEJAHTERA	Kabupaten Pasaman	150,00
383	PT.	KAKAK ADE PADANG PARIAMAN BERKAH	Kabupaten Padang Pariaman	6.800,00
384	PT.	JURAGAN MUDA BERSAUDARA	Kabupaten Pesisir Selatan	3.600,00
385	CV.	JRAS NOFAREN PRIMA	Kota Payakumbuh	1.673,60
386	CV.	JOBINA MULIA ABADI	Kota Padang	140,00
387	PT.	JCO DONUT & COFFEE	Kota Padang	447,00
388	PT.	JAPFA COMFEED INDONESIA	Kabupaten Agam	680,90
389	PT.	ISUINDOMAS PUTRA	Kota Padang	167,50
390	CV.	INTISHAR	Kota Payakumbuh	32,90
391	PT.	INTI CITRA AGUNG	Kota Padang	38.974,20
392	PT.	INTERCOM MOBILINDO	Kabupaten Pasaman Barat	505,30
393	PT.	INTAI ABADI INDONESIA	Kota Padang	49,20
394	PT.	KUTALAGA JAYA ABADI	Kabupaten Sijunjung	8.484,90
395	PT.	LURETTA KONSULTAN GRUP	Kota Padang	198,70

396	PT. LUMPO	Kabupaten Pesisir Selatan	20.000,00
397	PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA	Kabupaten Padang Pariaman	48,00
398	PT. LUBUK MINTURUN KONSTRUKSI PERSADA	Kabupaten Padang Pariaman	15,00
399	PT. LOKATARA CIPTA SENTOSA	Kota Padang	500,00
400	CV. LINBER	Kabupaten Tanah Datar	1.869,00
401	PT. LIMBAS SURYA CIPTA MANDIRI	Kabupaten Lima Puluh Kota	31,50
402	CV. LIMA PUTRA MANDIRI	Kota Padang	250,00
403	CV. LENTERA NEGERI NUSANTARA	Kabupaten Pesisir Selatan	4.677,00
404	PT. LARAS INTERNUSA	Kabupaten Pasaman Barat	17.903,80
405	PT. LANEFA KARYA PERSADA	Kota Pariaman	2.490,00
406	PT. LAMBANG AZAS MULIA	Kota Padang	116,20
407	PT. KWARTA DAYA ENJINIRING	Kabupaten Tanah Datar	377,50
408	PT. PADALERE NUSA ENERGI	Kabupaten Pasaman	1.220,00
409	PT. OSCAR PADANG AGRO LESTARI	Kabupaten Sijunjung	35.504,92
410	PT. ONU MENTAWAI INTERNASIONAL	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.220,00
411	PT. OMBAK MULIA SEJATI	Kota Padang	220,00
412	PT. NUSANTARA SATRIA AGUNG	Kota Padang	40,00
413	PT. NUSANTARA BETA FARMA	Kabupaten Padang Pariaman	3,40
414	PT. NUSA SEJAHTERA BINA ENERGI NASIONAL	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.300,00
415	PT. NUSA ALAM LESTARI	Kota Sawah Lunto	821,53
416	CV. NUCIFERA HIRO INDONESIA	Kota Padang	905,00
417	PT. NUANSA CIPTA KIRANA	Kota Padang	7,00
418	PT. NSR MEDICAL GROUP	Kabupaten Lima Puluh Kota	85,00
419	PT. NIAGATAMA KENCANA	Kabupaten Agam	8.748,80
420	PT. NIAGA INDOGUNA YASA	Kota Bukittinggi	53,93
421	PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA	Kota Padang	54.975,90
422	PT. NAIKILAH PERUSAHAAN MINANG	Kota Padang Panjang	100,00
423	PT. MUTIARA BATANG TABIK	Kabupaten Lima Puluh Kota	105,00
424	PT. MUTIARA AGAM	Kabupaten Agam	16.538,91
425	PT. MULYA REZKINA SEJAHTERA	Kabupaten Pasaman Barat	107,00
426	PT. MULTIKARYA SAWIT PRIMA	Kabupaten Solok Selatan	85,50
427	PT. MULTI KARYA PETAMA	Kabupaten Lima Puluh Kota	951,23
428	PT. MULTI BUANA USAHA	Kota Padang	415,90
429	PT. MUDA TERUNA KARGO	Kota Padang Panjang	7.495,20
430	PT. MUDA TERUNA JAYA	Kota Padang Panjang	2.808,70
431	PT. MUDA MEDIKA MANDIRI	Kota Padang	103.100,00
432	PT. MUDA MADANI INDONESIA	Kota Payakumbuh	17.774,86
433	PT. MRANTI MAS PRATAMA	Kabupaten Pasaman	15,00
434	PT. MORULA IVF PADANG	Kota Padang	13,20
435	PT. MONICA HIJAULESTARI	Kota Padang	410,21
436	PT. MIYOR PRIMA ABADI	Kabupaten Sijunjung	81.638,10
437	UMK		5.128.397,76
JUMLAH			13.937.488,24





SERTIFIKAT

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN
KAJIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TRIWULAN IV

TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN NILAI IKM **97,625** DAN MUTU PELAYANAN A
KINERJA PELAYANAN **SANGAT BAIK**



Kepala DPMPPTSP
Provinsi Sumatera Barat

Ttd

Adib Alfikri, SE, M. Si
NIP 197304131997031001



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**



**NOMOR : 700/09/LHE/INSP/2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspektorat@sumbarprov.go.id

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN : 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-422-2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/1126/Insp-SAU/2024 tanggal 26 April 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 29 April s.d 3 Juni 2024

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Delliyarti. SM |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeni |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Elvita Darma
2) Sri Pusparani Oktavia
3) Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : 1) Jelita Alamsyah
2) Faizati
3) Khairul
4) Rahmi Izzati
5) Fahru Rozi
6) Gerhana Bulan Butet Lubis
7) Yanti Jasvia
8) Erlina
9) Yunesvo Melya
10) Ranita Jasman
11) Egi Kurniawan
12) Mutia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada DPMPTSP memperoleh nilai **80,53** kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,49
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,07
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,84
4.	Evaluasi Internal	25,00	20,13
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,53
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **26,49** dengan uraian sebagai berikut :

- DPMPTSP sudah menyusun seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja yang meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mempedomani Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Setiap Unit/Satuan Kerja/Bidang dan Sub Bidang serta seluruh pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja.
- Dokumen Perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai, Tujuan dan Sasaran telah jelas menggambarkan kondisi yang akan dicapai, indikator kinerja sudah memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Bound* (SMART) serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan kinerja antar bidang (*crosscutting*).
- Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut:
 - Belum seluruh pegawai mempunyai komitmen untuk menyusun perencanaan kinerja dan menyampaikan hasil perencanaan kinerja secara berkala. Hal ini terlihat pada saat evaluasi, masih banyak pegawai yang baru menyusun SKP dan melaporkan capaian triwulan I pada bulan Mei 2024, sementara seharusnya untuk SKP disusun diawal tahun dan capaian triwulan I dilaporkan paling lambat tanggal 15 April 2024.
 - Dokumentasi/notulen pemantauan capaian rencana aksi dilakukan pada

saat pelaporan setiap triwulan saja, notulen pada saat rapat-rapat pembahasan capaian kinerja mingguan/bulanan tidak didokumentasikan dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **22,07** dengan uraian sebagai berikut :

- a. DPMPTSP sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.
- c. Telah terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
- d. Pengukuran capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
 - 2) Hasil pengukuran kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, sebagian pegawai hanya menjalankan aktivitas, tanpa terpengaruh rendah/tingginya capaian kinerja organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **11,84** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu, telah direviu dan telah dipublikasikan.
- 3) Dokumen laporan kinerja telah disusun sesuai dengan Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja level nasional (*bench mark*) kinerja.
- c. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut:
 - 1) Efisiensi penggunaan sumber daya belum disajikan untuk setiap indikator kinerja, baru menyajikan efisiensi anggaran tahunan.
 - 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
 - 4) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar **20,13** dengan uraian sebagai berikut :

- a. DPMPTSP telah menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal dan telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP untuk penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai berikut:
 - 1) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sudah menggunakan Teknologi Informasi, namun belum sampai level staf.
 - 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DPMPTSP, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Pimpinan dan Unit kerja meningkatkan upaya agar seluruh pegawai mempunyai komitmen untuk menyusun perencanaan kinerja dan menyampaikan hasil perencanaan kinerja secara berkala sehingga penyusunan perencanaan kinerja dan penyampaian capaian kinerja dapat dilakukan tepat waktu.
- b. Menyusun dokumentasi/notulen pemantauan capaian rencana aksi pada setiap rapat pembahasan kinerja, baik mingguan, bulanan atau triwulan.

2. Pengukuran Kinerja.

- a. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja.
- b. Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat.

3. Pelaporan Kinerja.

- a. Menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap indikator kinerja.
- b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan sebagai dasar dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- c. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- d. Pimpinan dan seluruh unit kerja harus memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja sehingga menjadi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi agar pemantauan capaian kinerja internal dengan Teknologi Informasi dengan aplikasi e-sakip sumbarprov dapat dikembangkan sampai level staf.

- b. Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR,**
DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199303 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERHITUNGAN EFESIENSI

Keterangan: Nilai yang ada pada kolom yang berwarna kuning yang akan kita sajikan sebagai tingkat efisiensi kita. Untuk yang Nilai efisiensinya tercapai > 100% maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%



SASARAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR PER SASARAN	EFESIENSI KINERJA (((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x 100%	NILAI EFESIENSI KONVERSI NILAI EFESIENSI SKALA 0 - 100%) NE= 90% + (Efisiensi Kinerja/20 * 90)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat	2.253.395.938	2.213.197.456	122,52%	0,24	110,76%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.166.829.476	1.152.250.500	101,19%	0,02	56,10%
Meningkatnya Kinerja Organisasi	12.080.421.640	10.494.245.523	100,04%	0,13	82,93%

Kepala DPMPSTP
Provinsi Sumatera Barat

Pembina Utama
NIP. 197304131997031001